



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU**



NOMOR : 0 TAHUN 2020
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2020

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. H. NASRUDDIN, AM. M.Si**
Jabatan : Plt. Bupati Barru
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin No. 82 Barru

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Barru

2. a. Nama : **LUKMAN T.**
Jabatan : Ketua DPRD Kab. Barru
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin No. 25 Barru
b. Nama : **Drs. H. KAMIL.R, M.Si.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Barru
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin No. 25 Barru
c. Nama : **A.F.K. MAJID, ST.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Barru
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin No. 25 Barru

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, Untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA. 2021

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA. 2021, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA. 2021, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA. 2021.

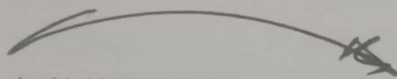
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Barru, 20 November 2020

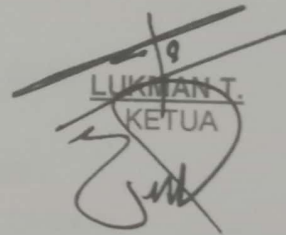
PLT. BUPATI BARRU

selaku,
PIHAK PERTAMA

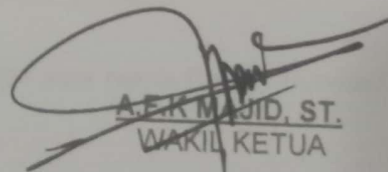


Ir. H. NASRUDDIN, AM. M.Si

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARRU
selaku
PIHAK KEDUA



Drs. H. KAMIL.R, M.Si.
WAKIL KETUA



A.E.R. MAUID, ST.
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2021 ini, merupakan penjabaran Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 dan bepedoman pada Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2021 yang dalam penyusunannya tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 disusun dengan melakukan sinkronisasi pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Rancangan RKP dan RKPD Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Barru yang disampaikan pada Musrenbang Kabupaten Barru Tahun 2020.

Berdasarkan muatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang penekanannya pada upaya memacu pembangunan daerah berkualitas untuk mewujudkan pemerataan, maka Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021, secara substansi telah mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan indikator sasaran dan target yang ingin dicapai pada tahun 2021 termasuk program dan kegiatan prioritas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dirangkum pada masing-masing urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan di dalam satu tahun anggaran.

Selanjutnya PPAS Tahun Anggaran 2021 dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Perumusan PPAS Tahun Anggaran 2021 merupakan kebijakan pemerintah daerah dengan maksud agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan pusat dan daerah sehingga dapat

mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah, selama kurun waktu satu tahun anggaran kedepan.

1.2 Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2021 bertujuan untuk menyiapkan dokumen yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan RKA-SKPD yang terjabar melalui program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk kemudian disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru.

1.3 Dasar Hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dasar Hukum pelaksanaan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2016–2021.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah memegang peranan yang cukup penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan daerah Sangat berdampak pada kemampuan belanja di daerah. Artinya, secara ideal perlu ada keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran..

Komponen pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barru terdiri dari i) Pendapatan Asli Daerah (PAD), ii) Pendapatan Transfer dan iii) lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pada tahun 2021 diasumsikan sebesar **Rp.957.284.303.545,00**

Berikut ini akan diuraikan seluruh uraian target pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari :

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Secara umum, Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021, ditargetkan sebesar **Rp. 106.995.777.751,00** yang didalamnya terdiri dari pajak daerah sebesar Rp.18.670.000.000,00; retribusi daerah sebesar Rp.8.451.218.360,00; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.8.942.135.943,00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.70.932.423.448,00

2.1.2 Pendapatan Transfer

Selanjutnya, untuk pendapatan transfer ditargetkan sebesar **Rp.826.910.725.794,00** yang terdiri dari i) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp.779.216.072.000,00 ii) Pendapatan transfer atar-daerah Rp.47.694.653.794,00.

2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kemudian pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar **Rp.23.377.800.000,00** terdiri dari i) Pendapatan Hibah sebesar Rp.23.377.800.000,00

2.2 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH DALAM KUA

Kebijakan fiskal dari sisi penerimaan dengan melakukan upaya-upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, regulasi perda yang terkait dengan pendapatan perlu ditinjau kembali.

Pada Tabel dibawah ini, diuraikan target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Barru.

Tabel 2.1

**Rencana Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran 2021**

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	<u>106.995.777.751,00</u>	
4.1.01.	Pajak Daerah	18.670.000.000,00	Perda Nomor 11 Tahun 2013
4.1.02.	Retribusi Daerah	8.451.218.360,00	Perda Nomor 12 Tahun 2013
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.942.135.943,00	
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	70.932.423.448,00	
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	<u>826.910.725.794,00</u>	
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	779.216.072.000,00	
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.694.653.794,00	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	<u>23.377.800.000,00</u>	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	23.377.800.000,00	
4.3.02.	Dana Darurat		
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	957.284.303.545,00	
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.183.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.183.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	967.467.303.545,00	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Untuk prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah didasarkan pada urusan pemerintahan, baik yang menjadi urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum maupun unsur kekhususan. Selain itu, prioritas pembangunan daerah juga menjadi dasar atas pelaksanaan penetapan belanja daerah Tahun Anggaran 2021.

Penetapan prioritas belanja daerah juga tetap mengacu pada prioritas pembangunan tingkat Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Pusat. Selain itu juga, hal-hal yang menjadi isu nasional seperti masalah pendidikan, kesehatan, kemiskinan maupun lainnya.

Untuk lebih jelasnya uraian prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.1

Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Barru Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik & Persentase Terbangunnya saluran pengendali banjir dan saluran pembuang	PUPR	
		2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PARIWISATA	
		3	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola dan berkembang	DINAS PARIWISATA	
		4	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	jumlah Kunjungan wisata	DINAS PARIWISATA	
		5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Lembaga yang bermitra dalam pengembangan destinasi	DINAS PARIWISATA	
		6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PERTANIAN	

		7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan	DINAS PERTANIAN	
		8	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah kasus kejadian penyakit yang tertangani	DINAS PERTANIAN	
		9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terlaksana	DINAS PERTANIAN	
		10	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Perizinan Usaha Pertanian	DINAS PERTANIAN	
		11	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang mampu menerapkan tekmologi pertanian tepat guna	DINAS PERTANIAN	
		12	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		DINAS KOP, UKM & DAG	
		13	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		DINAS KOP, UKM & DAG	
		14	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		15	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang dikelola	DINAS KETAHANAN PANGAN	

		16	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Skoring Pola Pangan Harapan	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		17	Penanganan Kerawanan Pangan		DINAS KETAHANAN PANGAN	
		18	Pengawasan Keamanan Pangan		DINAS KETAHANAN PANGAN	
		19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		DINAS PERIKANAN	
		20	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		DINAS PERIKANAN	
		21	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		DINAS PERIKANAN	
		22	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		DINAS PERIKANAN	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang sehat	DINAS KOP, UKM, & DAG	
		2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	DINAS KOP, UKM, & DAG	

		3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	DINAS KOP, UKM, & DAG	
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		DINAS KOP, UKM, & DAG	
		5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		DINAS KOP, UKM, & DAG	
		6	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		DINAS PMPTSPNAKER	
		7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS SOSIAL	
		8	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan PSM & Karang Taruna , Orsos dan TKSK yang memahami teknis pendampingan PMKS	DINAS SOSIAL	
		9	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase Anak dan Lansia Terlantar yang memperoleh bantuan sosial, Presentase Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang memperoleh bantuan sosial, Cakupan Eks penyandang penyakit sosial yang dibina	DINAS SOSIAL	
		10	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase masyarakat miskin yang memperoleh bantuan sosial & Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (SDGs)	DINAS SOSIAL	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	DINAS PENDIDIKAN	

		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi, APK SD/SDLB, APK SMP/Paket B, Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs, Jumlah PTK yang menerima sertifikasi	DINAS PENDIDIKAN	
		3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS KESEHATAN	
		4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio PKM per jumlah penduduk, Rasio Puskesmas Pembantu (pustu) persatuan Penduduk, Cakupan ketersediaan obat yang cukup dan memenuhi syarat penyimpanan	DINAS KESEHATAN	
				Persentase ibu hamil, ibu bersalin, ibu melahirkan, bayi baru lahir, balita, usia produktif dan lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	
				Cakupan penderita hipertensi, Diabetes Militus (DM), Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	
				Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (SDGs), Cakupan Puskesmas yang mendapatkan pembiayaan BOK	DINAS KESEHATAN	
		5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Rawat Jalan, Cakupan Rawat inap	DINAS KESEHATAN	
		6	Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan/Minuman	Jumlah fasilitas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	DINAS KESEHATAN	
		7	Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif strata Purnama dan Strata Mandiri, Cakupan Posyandu Strata Purnama dan Strata Mandiri	DINAS KESEHATAN	

		8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	RSUD	
		9	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah jenis pelayanan kesehatan BLUD	RSUD	
		10	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN		DINAS KOP, UKM & DAG	
		11	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		DINAS KOP, UKM & DAG	
		12	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		DINAS KOP, UKM & DAG	
		13	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		DINAS KOP, UKM & DAG	
		14	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja	DINAS PMPTSPNAKER	
		15	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	% tenaga kerja yang mendapatkan sertifikasi keahlian	DINAS PMPTSPNAKER	
		16	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam PUG	DINAS PMDPPKBPPPA	

		17	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah Kasus KDRT	DINAS PMDPPKBPPPA	
		18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah P2TP2A Aktif yang dibina	DINAS PMDPPKBPPPA	
		19	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Anak yang terlibat dalam forum anak dan berprestasi	DINAS PMDPPKBPPPA	
		20	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan penyelenggaraan program kelitbangan, Cakupan inovasi yang diterapkan	BAPPEDA	
		21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi, Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS DUKCAPIL	
		22	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah penduduk yang dilayani administrasi kependudukan (KTP KK)	DINAS DUKCAPIL	
		23	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah Penduduk yang dilayani Pencatatan Sipil	DINAS DUKCAPIL	
		24	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Laporan pengembangan data base kependudukan	DINAS DUKCAPIL	
		25	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Sistem Administrasi Kependudukan Yang dijalankan	DINAS DUKCAPIL	

		26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PMDPPKBPPPA	
		27	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase seluruh desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan administrasi desa	DINAS PMDPPKBPPPA	
		28	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase seluruh desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan administrasi desa, cakupan desa yang meningkat dalam pengelolaan pemerintahan desa, Jumlah desa yang memiliki Dokumen Perencanaan Tahunan sesuai standar	DINAS PMDPPKBPPPA	
		29	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, cakupan desa/ kel yang mendapatkan pembinaan kelembagaan ekonomi, cakupan desa yang menerapkan TTG	DINAS PMDPPKBPPPA	
		30	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah PUS yang terdaftar menjadi Peserta KB Aktif, Jumlah PIK KR yang terbentuk	DINAS PMDPPKBPPPA	
		31	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah BKB.BKR.BKL dan UPPKS yang dibina	DINAS PMDPPKBPPPA	
		32	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang mengenal potensi investasi	DINAS PMPTSPNAKER	
		33	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perizinan	DINAS PMPTSPNAKER	
		34	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Kemitraan UKM dengan perusahaan PMDN/PMA	DINAS PMPTSPNAKER	

		35	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal	DINAS PMPTSPNAKER	
		36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase kebutuhan administrasi yang terpenuhi	DINAS PMPTSPNAKER	
		37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	DIKPORA	
		38	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pembinaan Olah Raga yang dilaksanakan, Persentase sarana dan prasarana olah raga dalam kondisi baik, Jumlah atlet yang tangguh dan handal, Persentase sarana dan prasarana olah raga dalam kondisi baik	DIKPORA	
		39	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan kegiatan organisasi kepemudaan yang dibina, Cakupan kegiatan organisasi kepemudaan yang dibina, Jumlah pemuda yang berwirausaha dan terciptanya lapangan kerja	DIKPORA	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan, Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	DINAS PENDIDIKAN	
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN	
		3	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan	DINAS PENDIDIKAN	

		4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi.	BADAN KESBANGPOL	
		5	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA	Jumlah pertemuan pengembangan wawasan kebangsaan	BADAN KESBANGPOL	
		6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.	Jumlah kegiatan Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	BADAN KESBANGPOL	
		7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penduduk yang memperoleh penyuluhan mengenai bahaya narkoba miras, pidana perjudian dan prostitusi	BADAN KESBANGPOL	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi, Jumlah alat berat dalam kondisi baik, Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	PUPR	
		2	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kondisi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	PUPR	
		3	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Gedung Negara yang terbangun dan terpelihara	PUPR	
		4	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang, Penyusunan kebijakan dan pengendalian pemanfaatan ruang	PUPR	

		5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh sarana dan prasarana air Limbah	DINAS PKP	
		6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh sarana dan prasarana air minum	DINAS PKP	
		7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan administrasi yang terpenuhi, Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi, Persentase aparatur yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	DINAS PKP	
		8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah bantuan perumahan layak huni	DINAS PKP	
		9	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dipedesaan dan jumlah bantuan RTLH	DINAS PKP	
		10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah sarana infrastruktur permukiman yang terbangun, Persentase pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong, Persentase Pembangunan Penerangan Jalan, Areal Pemakaman umum yang tertata	DINAS PKP	
		11	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		DINAS SOSIAL	
		12	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		DINAS PKP	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran		

		2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi dan Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana	BPBD	
		3	Program Penanggulangan Bencana	cakupan warganegara yang memperoleh layanan penanggulangan bencana	BPBD	
		4	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	BPBD	
		5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan darurat pada daerah bencana	DINAS SOSIAL	
		6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		7	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase dokumen yang dikaji	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		8	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Pencemaran air, Tingkat Pencemaran Udara	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		9	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		10	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase B3 dan Limbah B3 yang dikendalikan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

		11	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan LH	Persentase usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan izin Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		12	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait	Persentas Masyarakat hukum adat yang didampingi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		13	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		14	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		15	Program penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		16	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		17	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		DINAS PKP	
		18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	DINAS PERHUBUNGAN	

		19	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah rambu jalan, jumlah marka jalan, Persentase kegiatan operasional pengelolaan pelabuhan penyeberangan dan Terminal, Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang dipelihara dan direhabitasi, Persentase penghargaan yang diperoleh di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DINAS PERHUBUNGAN	
		20	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase kegiatan operasional pengelolaan pelabuhan penyeberangan dan Terminal	DINAS PERHUBUNGAN	
		21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		DINAS KOMINFOSTAT	
		22	Program Informasi dan Komunikasi Publik		DINAS KOMINFOSTAT	
		23	Program Aplikasi Informatika		DINAS KOMINFOSTAT	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	CakupanKebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	SATPOL PP DAN DAMKAR	
		2	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3, Jumlah satuan keamanan lingkungan yang terdapat di masyarakat	SATPOL PP DAN DAMKAR	
		3	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda Yang Ditegakkan	SATPOL PP DAN DAMKAR	
		4	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.	Persentase Masyarakat yang terlibat dalam menjaga ketertiban dan keamanan, Persentase keaktifan Fokmas	BADAN KESBANGPOL	

		5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya jumlah Stakeholder yang mengetahui dan paham tentang Undang-Undang Politik	BADAN KESBANGPOL	
		6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi,	KECAMATAN	
		7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	KECAMATAN	
		8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi, Cakupan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan kecamatan pada bidang perencanaan, pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan	KECAMATAN	
		9	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pengaduan masyarakat yang tertangani	KECAMATAN	
		10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	BKPSDM	
		11	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase aparatur yang dilayani pada bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Persentase aparatur yang dilayani pada bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi, Jumlah jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi yang diisi, Jumlah aparatur yang lulus pendidikan dan pelatihan, Persentase aparatur yang dilayani pada bidang Diklat, Penilaian Kinerja dan Penghargaan	BKPSDM	
		12	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur yang menaati peraturan disiplin PNS	BKPSDM	

		13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi	SEK DPRD	
		14	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD, Tingkat Pencapaian Disiplin Aparatur	SEK DPRD	
		15	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD, Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD, Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD	SEK DPRD	
		16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi, Terjalinnnya Koordinasi dan komunikasi dan harmonis dengan stake holder	BAG. UMUM	
		17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	
		18	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan KDH	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	
		19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		BAG. PEMERINTAHAN	
		20	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		BAG. PEMERINTAHAN	
		21	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		BAG. PEMERINTAHAN	

		22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		BAG. HUKUM	
		23	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		BAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
		24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	BAG. PEREKONOMIAN	
		25	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan kinerja perekonomian daerah	BAG. PEREKONOMIAN	
		26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	BAG. KESRA	
		27	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Pembinaan Tim Pembina UKS	BAG. KESRA	
		28	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi, Persentasi Pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Aturan dan tujuan penyusunannya serta Implementasi Ketatalaksana, Persentase SKPD yang Memiliki/menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jumlah Analisis jabatan yang tersusun sesuai beban kerja	BAG. ORGANISASI	
		29	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi, cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur	BAG. PENG. BARJAS	

		30	Perekonomian dan Pembangunan	Transparansi dan akuntabilitas penyediaan Barang dan Jasa Pemda	BAG. PENG. BARJAS	
		31	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik pertanian sesuai standar baku dan tepat waktu	DINAS KOMINFOSTAT	
		32	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan Penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	DINAS KOMINFOSTAT	
		33	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	DINAS PERPUS & ARSIP	
		34	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan umum perpustakaan Kel/Desa Taman Baca, Rasio Jumlah buku dengan jumlah penduduk	DINAS PERPUS & ARSIP	
		35	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Presentase dokumen arsip yang tersimpan sesuai dengan jenis klasifikasi kearsipan, Jumlah dokumen arsip yang penting yang bernilai sejarah yang dipelihara, Jumlah sarana dan prasarana Kearsipan yang dipelihara	DINAS PERPUS & ARSIP	
		36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	BAPPEDA	
		37	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan, Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Cakupan penyusunan dan/informasi pembangunan	BAPPEDA	

		38	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan OPD bidang ekonomi yang dikoordinasikan dan difasilitasi , Cakupan OPD bidang sosial budaya yang dikoordinasikan dan difasilitasi , Cakupan OPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang dikoordinasikan dan difasilitasi	BAPPEDA	
		39	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	BPKAD	
		40	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		BPKAD	
		41	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		BAPENDA	
		42	Pengelolaan Pendapatan Daerah		BAPENDA	
		43	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kontrol Administrasi Keuangan	BAPENDA	
		44	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	INSPEKTORAT DAERAH	
		45	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan	INSPEKTORAT DAERAH	
		46	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi	INSPEKTORAT DAERAH	

TABEL 3.2

Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Barru Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Berdayasaing	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS SOSIAL	
		2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan PSM & Karang Taruna , Orsos dan TKSK yang memahami teknis pendampingan PMKS	DINAS SOSIAL	
		3 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase Anak dan LansiaTerlantar yang memperoleh bantuan sosial, Presentase Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang memperoleh bantuan sosial, Cakupan Eks penyandang penyakit sosial yang dibina	DINAS SOSIAL	
		4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	DINAS PENDIDIKAN	
		5 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi, APK SD/SDLB, APK SMP/Paket B, Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs, Jumlah PTK yang menerima sertifikasi	DINAS PENDIDIKAN	
		6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS KESEHATAN	
		7 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio PKM per jumlah penduduk, Rasio Puskesmas Pembantu (pustu) persatuan Penduduk, Cakupan ketersediaan obat yang cukup dan memenuhi syarat penyimpanan	DINAS KESEHATAN	

				Persentase ibu hamil, ibu bersalin, ibu melahirkan, bayi baru lahir, balita, usia produktif dan lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	
				Cakupan penderita hipertensi, Diabetes Militus (DM), Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	
				Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (SDGs), Cakupan Puskesmas yang mendapatkan pembiayaan BOK	DINAS KESEHATAN	
		8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Rawat Jalan, Cakupan Rawat inap	DINAS KESEHATAN	
		9	Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan/Minuman	Jumlah fasilitas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	DINAS KESEHATAN	
		10	Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif strata Purnama dan Strata Mandiri, Cakupan Posyandu Strata Purnama dan Strata Mandiri	DINAS KESEHATAN	
		11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	RSUD	
		12	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah jenis pelayanan kesehatan BLUD	RSUD	
		13	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN		DINAS KOP, UKM & DAG	
		14	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		DINAS KOP, UKM & DAG	
		15	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		DINAS KOP, UKM & DAG	
		16	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		DINAS KOP, UKM & DAG	
		17	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja	DINAS PMPTSPNAKER	
		18	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	% tenaga kerja yang mendapatkan sertifikasi keahlian	DINAS PMPTSPNAKER	

		19	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam PUG	DINAS PMDPPKBPPPA	
		20	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah Kasus KDRT	DINAS PMDPPKBPPPA	
		21	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah P2TP2A Aktif yang dibina	DINAS PMDPPKBPPPA	
		22	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Anak yang terlibat dalam forum anak dan berprestasi	DINAS PMDPPKBPPPA	
		23	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan penyelenggaraan program kelitbangan, Cakupan inovasi yang diterapkan	BAPPEDA	
2	Pengembangan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PARIWISATA	
		2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola dan berkembang	DINAS PARIWISATA	
		3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	jumlah Kunjungan wisata	DINAS PARIWISATA	
		4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Lembaga yang bermitra dalam pengembangan destinasi	DINAS PARIWISATA	
		5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PERTANIAN	
		6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan	DINAS PERTANIAN	
		7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah kasus kejadian penyakit yang tertangani	DINAS PERTANIAN	
		8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terlaksana	DINAS PERTANIAN	
		9	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Perizinan Usaha Pertanian	DINAS PERTANIAN	
		10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang mampu menerapkan teknologi pertanian tepat guna	DINAS PERTANIAN	
		11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		DINAS KOP, UKM & DAG	
		12	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		DINAS KOP, UKM & DAG	

		13	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		14	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang dikelola	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		15	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Skoring Pola Pangan Harapan	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		16	Penanganan Kerawanan Pangan		DINAS KETAHANAN PANGAN	
		17	Pengawasan Keamanan Pangan		DINAS KETAHANAN PANGAN	
		18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		DINAS PERIKANAN	
		19	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		DINAS PERIKANAN	
		20	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		DINAS PERIKANAN	
		21	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		DINAS PERIKANAN	
		22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi, Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS DUKCAPIL	
		23	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah penduduk yang dilayani administrasi kependudukan (KTP KK)	DINAS DUKCAPIL	
		24	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah Penduduk yang dilayani Pencatatan Sipil	DINAS DUKCAPIL	
		25	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Laporan pengembangan data base kependudukan	DINAS DUKCAPIL	
		26	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Sistem Administrasi Kependudukan Yang dijalankan	DINAS DUKCAPIL	
		27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PMDPPKBPPPA	
		28	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase seluruh desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan administrasi desa	DINAS PMDPPKBPPPA	

		29	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase seluruh desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan administrasi desa, cakupan desa yang meningkat dalam pengelolaan pemerintahan desa, Jumlah desa yang memiliki Dokumen Perencanaan Tahunan sesuai standar	DINAS PMDPPKBPPPA	
		30	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, cakupan desa/ kel yang mendapatkan pembinaan kelembagaan ekonomi, cakupan desa yang menerapkan TTG	DINAS PMDPPKBPPPA	
		31	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah PUS yang terdaftar menjadi Peserta KB Aktif, Jumlah PIK KR yang terbentuk	DINAS PMDPPKBPPPA	
		32	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah BKB.BKR.BKL dan UPPKS yang dibina	DINAS PMDPPKBPPPA	
		33	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang mengenal potensi investasi	DINAS PMPTSPNAKER	
		34	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perizinan	DINAS PMPTSPNAKER	
		35	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Kemitraan UKM dengan perusahaan PMDN/PMA	DINAS PMPTSPNAKER	
		36	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal	DINAS PMPTSPNAKER	
		37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase kebutuhan administrasi yang terpenuhi	DINAS PMPTSPNAKER	
		38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	DINAS PEMUDA DAN OR	
		39	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pembinaan Olah Raga yang dilaksanakan, Persentase sarana dan prasarana olah raga dalam kondisi baik, Jumlah atlet yang tangguh dan handal, Persentase sarana dan prasarana olah raga dalam kondisi baik	DINAS PEMUDA DAN OR	

		40	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan kegiatan organisasi kepemudaan yang dibina. Cakupan kegiatan organisasi kepemudaan yang dibina, Jumlah pemuda yang berwirausaha dan terciptanya lapangan kerja	DINAS PEMUDA DAN OR	
		41	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan, Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	DINAS PENDIDIKAN	
		42	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN	
		43	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan	DINAS PENDIDIKAN	
		44	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi.	BADAN KESBANGPOL	
		45	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA	Jumlah pertemuan pengembangan wawasan kebangsaan	BADAN KESBANGPOL	
		46	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.	Jumlah kegiatan Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	BADAN KESBANGPOL	
		47	PPROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penduduk yang memperoleh penyuluhan mengenai bahaya narkoba miras, pidana perjudian dan prostitusi	BADAN KESBANGPOL	
3	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi, Jumlah alat berat dalam kondisi baik, Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	PUPR	
		2	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kondisi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	PUPR	
		3	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Gedung Negara yang terbangun dan terpelihara	PUPR	
		4	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang, Penyusunan kebijakan dan pengendalian pemanfaatan ruang	PUPR	
		5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh sarana dan prasarana air Limbah	DINAS PKP	
		6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh sarana dan prasarana air minum	DINAS PKP	

		7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan administrasi yang terpenuhi, Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi, Persentase aparatur yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	DINAS PKP	
		8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah bantuan perumahan layak huni	DINAS PKP	
		9	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dipedesaan dan jumlah bantuan RTLH	DINAS PKP	
		10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah sarana infrastruktur permukiman yang terbangun, Persentase pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong, Persentase Pembangunan Penerangan Jalan, Areal Pemakaman umum yang tertata	DINAS PKP	
		11	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		DINAS SOSIAL	
		12	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		DINAS PKP	
		18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	DINAS PERHUBUNGAN	
		19	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah rambu jalan, jumlah marka jalan, Persentase kegiatan operasional pengelolaan pelabuhan penyeberangan dan Terminal, Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang dipelihara dan direhabitasi, Persentase penghargaan yang diperoleh di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DINAS PERHUBUNGAN	
		20	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase kegiatan operasional pengelolaan pelabuhan penyeberangan dan Terminal	DINAS PERHUBUNGAN	
		21	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik & Persentase Terbangunnya saluran pengendali banjir dan saluran pembuang	PUPR	
4	Percepatan pemulihan dan transformasi perlindungan social	1	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang sehat	DINAS KOP, UKM, & DAG	
		2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	DINAS KOP, UKM, & DAG	

		3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	DINAS KOP, UKM, & DAG	
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		DINAS KOP, UKM, & DAG	
		5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		DINAS KOP, UKM, & DAG	
		6	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		DINAS PMPTSPNAKER	
		10	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase masyarakat miskin yang memperoleh bantuan sosial & Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (SDGs)	DINAS SOSIAL	
5	Pengelolaan Sumberdaya alam berbasis Kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana serta perubahan iklim	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase dokumen yang dikaji	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		3	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Pencemaran air, Tingkat Pencemaran Udara	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase B3 dan Limbah B3 yang dikendalikan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan LH	Persentase usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan izin Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait	Persentas Masyarakat hukum adat yang didampingi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

		9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		10	Program penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		12	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		DINAS PKP	
		13	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran		
		14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi dan Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana	BPBD	
		15	Program Penanggulangan Bencana	cakupan warganegara yang memperoleh layanan penanggulangan bencana	BPBD	
		16	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	BPBD	
		17	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan darurat pada daerah bencana	DINAS SOSIAL	
6	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayanan publik	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		DINAS KOMINFOSTAT	
		2	Program Informasi dan Komunikasi Publik		DINAS KOMINFOSTAT	
		3	Program Aplikasi Informatika		DINAS KOMINFOSTAT	
		4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	CakupanKebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	SATPOL PP DAN DAMKAR	
		5	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3, Jumlah satuan keamanan lingkungan yang terdapat di masyarakat	SATPOL PP DAN DAMKAR	
		6	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda Yang Ditegakkan	SATPOL PP DAN DAMKAR	

		7	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.	Persentase Masyarakat yang terlibat dalam menjaga ketertiban dan keamanan, Persentase keaktifan Fokmas	BADAN KESBANGPOL	
		8	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya jumlah Stakeholder yang mengetahui dan paham tentang Undang-Undang Politik	BADAN KESBANGPOL	
		9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi,	KECAMATAN	
		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	KECAMATAN	
		11	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi, Cakupan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan kecamatan pada bidang perencanaan, pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan	KECAMATAN	
		12	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pengaduan masyarakat yang tertangani	KECAMATAN	
		13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	BKPSDM	
		14	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase aparatur yang dilayani pada bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Persentase aparatur yang dilayani pada bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi, Jumlah jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi yang diisi, Jumlah aparatur yang lulus pendidikan dan pelatihan, Persentase aparatur yang dilayani pada bidang Diklat, Penilaian Kinerja dan Penghargaan	BKPSDM	
		15	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur yang menaati peraturan disiplin PNS	BKPSDM	

		16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi	SEK DPRD	
		17	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD, Tingkat Pencapaian Disiplin Aparatur	SEK DPRD	
		18	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD, Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD, Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD	SEK DPRD	
		19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi, Terjalinnnya Koordinasi dan komunikasi dan harmonis dengan stake holder	BAG. UMUM	
		20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	
		21	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan KDH	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	
		22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		BAG. PEMERINTAHAN	
		23	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		BAG. PEMERINTAHAN	
		24	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		BAG. PEMERINTAHAN	
		25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		BAG. HUKUM	
		26	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		BAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
		27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	BAG. PEREKONOMIAN	
		28	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan kinerja perekonomian daerah	BAG. PEREKONOMIAN	
		29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	BAG. KESRA	

		30	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Pembinaan Tim Pembina UKS	BAG. KESRA	
		31	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi, Persentasi Pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Aturan dan tujuan penyusunannya serta Implementasi Ketatalaksana, Persenatase SKPD yang Memiliki/menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jumlah Analisis jabatan yang tersusun sesuai beban kerja	BAG. ORGANISASI	
		32	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi, cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur	BAG. PENG. BARJAS	
		33	Perekonomian dan Pembangunan	Transparansi dan akuntabilitas penyediaan Barang dan Jasa Pemda	BAG. PENG. BARJAS	
		34	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik pertanian sesuai standar baku dan tepat waktu	DINAS KOMINFOSTAT	
		35	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan Penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	DINAS KOMINFOSTAT	
		36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	DINAS PERPUS & ARSIP	
		37	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan umum perpustakaan Kel/Desa Taman Baca, Rasio Jumlah buku dengan jumlah penduduk	DINAS PERPUS & ARSIP	
		38	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Presentase dokumen arsip yang tersimpan sesuai dengan jenis klasifikasi kearsipan, Jumlah dokumen arsip yang penting yang bernilai sejarah yang dipelihara, Jumlah sarana dan prasarana Kearsipan yang dipelihara	DINAS PERPUS & ARSIP	
		39	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	BAPPEDA	

		40	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan, Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Cakupan penyusunan dan/informasi pembangunan	BAPPEDA	
		41	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan OPD bidang ekonomi yang dikoordinasikan dan difasilitasi , Cakupan OPD bidang sosial budaya yang dikoordinasikan dan difasilitasi , Cakupan OPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang dikoordinasikan dan difasilitasi	BAPPEDA	
		42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	BPKAD	
		43	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		BPKAD	
		44	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		BAPENDA	
		45	Pengelolaan Pendapatan Daerah		BAPENDA	
		46	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kontrol Administrasi Keuangan	BAPENDA	
		47	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	INSPEKTORAT DAERAH	
		48	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan	INSPEKTORAT DAERAH	
		49	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi	INSPEKTORAT DAERAH	

TABEL 3.3
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Kabupaten Barru	Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar untuk mewujudkan SDM berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter;	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS SOSIAL	
		2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan PSM & Karang Taruna , Orsos dan TKSK yang memahami teknis pendampingan PMKS	DINAS SOSIAL	
		3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase Anak dan Lansia Terlantar yang memperoleh bantuan sosial, Presentase Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang memperoleh bantuan sosial, Cakupan Eks penyandang penyakit sosial yang dibina	DINAS SOSIAL	
		4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	DINAS PENDIDIKAN	
		5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi, APK SD/SDLB, APK SMP/Paket B, Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs, Jumlah PTK yang menerima sertifikasi	DINAS PENDIDIKAN	
		6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS KESEHATAN	
		7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio PKM per jumlah penduduk, Rasio Puskesmas Pembantu (pustu) persatuan Penduduk, Cakupan ketersediaan obat yang cukup dan memenuhi syarat penyimpanan	DINAS KESEHATAN	
				Persentase ibu hamil, ibu bersalin, ibu melahirkan, bayi baru lahir, balita, usia produktif dan lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	

				Cakupan penderita hipertensi, Diabetes Militus (DM), Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	
				Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (SDGs), Cakupan Puskesmas yang mendapatkan pembiayaan BOK	DINAS KESEHATAN	
		8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Rawat Jalan, Cakupan Rawat inap	DINAS KESEHATAN	
		9	Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan/Minuman	Jumlah fasilitas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	DINAS KESEHATAN	
		10	Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif strata Purnama dan Strata Mandiri, Cakupan Posyandu Strata Purnama dan Strata Mandiri	DINAS KESEHATAN	
		11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	RSUD	
		12	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah jenis pelayanan kesehatan BLUD	RSUD	
		13	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN		DINAS KOP, UKM & DAG	
		14	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		DINAS KOP, UKM & DAG	
		15	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		DINAS KOP, UKM & DAG	
		16	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		DINAS KOP, UKM & DAG	
		17	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja	DINAS PMPTSPNAKER	
		18	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	% tenaga kerja yang mendapatkan sertifikasi keahlian	DINAS PMPTSPNAKER	
		19	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam PUG	DINAS PMDPPKBPPPA	
		20	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah Kasus KDRT	DINAS PMDPPKBPPPA	
		21	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah P2TP2A Aktif yang dibina	DINAS PMDPPKBPPPA	

		22	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Anak yang terlibat dalam forum anak dan berprestasi	DINAS PMDPPKBPPPA	
		23	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan penyelenggaraan program kelitbangan, Cakupan inovasi yang diterapkan	BAPPEDA	
		39	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Olah Raga yang dilaksanakan, Presentase sarana dan prasarana olah raga dalam kondisi baik, Jumlah atlet yang tangguh dan handal, Presentase sarana dan prasarana olah raga dalam kondisi baik	DINAS PEMUDA DAN OR	
		40	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan kegiatan organisasi kepemudaan yang dibina, Cakupan kegiatan organisasi kepemudaan yang dibina, Jumlah pemuda yang berwirausaha dan terciptanya lapangan kerja	DINAS PEMUDA DAN OR	
		41	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan, Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	DINAS PENDIDIKAN	
		42	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN	
		43	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan	DINAS PENDIDIKAN	
2	Peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat;	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PARIWISATA	
		2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola dan berkembang	DINAS PARIWISATA	
		3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	jumlah Kunjungan wisata	DINAS PARIWISATA	
		4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Lembaga yang bermitra dalam pengembangan destinasi	DINAS PARIWISATA	
		5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PERTANIAN	
		6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan	DINAS PERTANIAN	
		7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah kasus kejadian penyakit yang tertangani	DINAS PERTANIAN	
		8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terlaksana	DINAS PERTANIAN	

		9	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Perizinan Usaha Pertanian	DINAS PERTANIAN	
		10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang mampu menerapkan teknologi pertanian tepat guna	DINAS PERTANIAN	
		11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		DINAS KOP, UKM & DAG	
		12	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		DINAS KOP, UKM & DAG	
		13	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		14	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang dikelola	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		15	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Skoring Pola Pangan Harapan	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		16	Penanganan Kerawanan Pangan		DINAS KETAHANAN PANGAN	
		17	Pengawasan Keamanan Pangan		DINAS KETAHANAN PANGAN	
		18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		DINAS PERIKANAN	
		19	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		DINAS PERIKANAN	
		20	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		DINAS PERIKANAN	
		21	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		DINAS PERIKANAN	
		33	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang mengenal potensi investasi	DINAS PMPTSPNAKER	
		34	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perizinan	DINAS PMPTSPNAKER	
		35	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Kemitraan UKM dengan perusahaan PMDN/PMA	DINAS PMPTSPNAKER	
		36	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal	DINAS PMPTSPNAKER	
		37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase kebutuhan administrasi yang terpenuhi	DINAS PMPTSPNAKER	

		38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	DINAS PEMUDA DAN OR	
		1	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang sehat	DINAS KOP, UKM, & DAG	
		2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	DINAS KOP, UKM, & DAG	
		3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	DINAS KOP, UKM, & DAG	
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		DINAS KOP, UKM, & DAG	
		5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		DINAS KOP, UKM, & DAG	
		6	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		DINAS PMPTSPNAKER	
		10	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase masyarakat miskin yang memperoleh bantuan sosial & Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (SDGs)	DINAS SOSIAL	
3	Perwujudan Keamanan dan Ketertiban;	13	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran		
		14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi dan Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana	BPBD	
		15	Program Penanggulangan Bencana	cakupan warganegara yang memperoleh layanan penanggulangan bencana	BPBD	
		16	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	BPBD	
		17	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan darurat pada daerah bencana	DINAS SOSIAL	
		4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	CakupanKebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	SATPOL PP DAN DAMKAR	
		5	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3, Jumlah satuan keamanan lingkungan yang terdapat di masyarakat	SATPOL PP DAN DAMKAR	

		6	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda Yang Ditegakkan	SATPOL PP DAN DAMKAR	
		7	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.	Persentase Masyarakat yang terlibat dalam menjaga ketertiban dan keamanan, Persentase keaktifan Fokmas	BADAN KESBANGPOL	
		8	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya jumlah Stakeholder yang mengetahui dan paham tentang Undang-Undang Politik	BADAN KESBANGPOL	
		44	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi.	BADAN KESBANGPOL	
		45	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA	Jumlah pertemuan pengembangan wawasan kebangsaan	BADAN KESBANGPOL	
		46	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.	Jumlah kegiatan Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	BADAN KESBANGPOL	
		47	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penduduk yang memperoleh penyuluhan mengenai bahaya narkoba miras, pidana perjudian dan prostitusi	BADAN KESBANGPOL	
4	Percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan wilayah dengan memperhatikan keberlanjutan Lingkungan;	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi, Jumlah alat berat dalam kondisi baik, Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	PUPR	
		2	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kondisi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	PUPR	
		3	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Gedung Negara yang terbangun dan terpelihara	PUPR	
		4	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang, Penyusunan kebijakan dan pengendalian pemanfaatan ruang	PUPR	
		5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh sarana dan prasarana air Limbah	DINAS PKP	
		6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh sarana dan prasarana air minum	DINAS PKP	
		7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan administrasi yang terpenuhi, Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi, Persentase aparatur yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	DINAS PKP	

		8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah bantuan perumahan layak huni	DINAS PKP	
		9	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dipedesaan dan jumlah bantuan RTLH	DINAS PKP	
		10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah sarana infrastruktur permukiman yang terbangun, Persentase pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong, Persentase Pembangunan Penerangan Jalan, Areal Pemakaman umum yang tertata	DINAS PKP	
		11	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		DINAS SOSIAL	
		12	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		DINAS PKP	
		18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	DINAS PERHUBUNGAN	
		19	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah rambu jalan, jumlah marka jalan, Persentase kegiatan operasional pengelolaan pelabuhan penyeberangan dan Terminal, Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang dipelihara dan direhabitasi, Persentase penghargaan yang diperoleh di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DINAS PERHUBUNGAN	
		20	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase kegiatan operasional pengelolaan pelabuhan penyeberangan dan Terminal	DINAS PERHUBUNGAN	
		21	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik & Persentase Terbangunnya saluran pengendali banjir dan saluran pembuang	PUPR	
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase dokumen yang dikaji	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		3	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Pencemaran air, Tingkat Pencemaran Udara	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

		5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase B3 dan Limbah B3 yang dikendalikan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan LH	Persentase usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan izin Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait	Persentas Masyarakat hukum adat yang didampingi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		10	Program penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		12	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		DINAS PKP	
5	Akselerasi tata kelola dan reformasi Birokrasi.	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		DINAS KOMINFOSTAT	
		2	Program Informasi dan Komunikasi Publik		DINAS KOMINFOSTAT	
		3	Program Aplikasi Informatika		DINAS KOMINFOSTAT	
		9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi,	KECAMATAN	
		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	KECAMATAN	
		11	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi, Cakupan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan kecamatan pada bidang perencanaan, pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan	KECAMATAN	
		12	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pengaduan masyarakat yang tertangani	KECAMATAN	

		13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	BKPSDM	
		14	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase aparatur yang dilayani pada bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Persentase aparatur yang dilayani pada bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi, Jumlah jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi yang diisi, Jumlah aparatur yang lulus pendidikan dan pelatihan, Persentase aparatur yang dilayani pada bidang Diklat, Penilaian Kinerja dan Penghargaan	BKPSDM	
		15	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur yang menaati peraturan disiplin PNS	BKPSDM	
		16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi	SEK DPRD	
		17	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD, Tingkat Pencapaian Disiplin Aparatur	SEK DPRD	
		18	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD, Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD, Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD	SEK DPRD	
		19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi, Terjalinnnya Koordinasi dan komunikasi dan harmonis dengan stake holder	BAG. UMUM	
		20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	
		21	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan KDH	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	
		22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		BAG. PEMERINTAHAN	
		23	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		BAG. PEMERINTAHAN	
		24	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		BAG. PEMERINTAHAN	
		25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		BAG. HUKUM	

		26	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		BAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
		27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	BAG. PEREKONOMIAN	
		28	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan kinerja perekonomian daerah	BAG. PEREKONOMIAN	
		29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	BAG. KESRA	
		30	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pembinaan Tim Pembina UKS	BAG. KESRA	
		31	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi, Persentase Pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Aturan dan tujuan penyusunannya serta Implementasi Ketatalaksana, Persentase SKPD yang Memiliki/menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jumlah Analisis jabatan yang tersusun sesuai beban kerja	BAG. ORGANISASI	
		32	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi, cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur	BAG. PENG. BARJAS	
		33	Perekonomian dan Pembangunan	Transparansi dan akuntabilitas penyediaan Barang dan Jasa Pemda	BAG. PENG. BARJAS	
		34	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik pertanian sesuai standar baku dan tepat waktu	DINAS KOMINFOSTAT	
		35	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan Penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	DINAS KOMINFOSTAT	
		36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	DINAS PERPUS & ARSIP	
		37	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan umum perpustakaan Kel/Desa Taman Baca, Rasio Jumlah buku dengan jumlah penduduk	DINAS PERPUS & ARSIP	

		38	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Presentase dokumen arsip yang tersimpan sesuai dengan jenis klasifikasi kearsipan, Jumlah dokumen arsip yang penting yang bernilai sejarah yang dipelihara, Jumlah sarana dan prasarana Kearsipan yang dipelihara	DINAS PERPUS & ARSIP	
		39	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	BAPPEDA	
		40	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan, Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Cakupan penyusunan dan/informasi pembangunan	BAPPEDA	
		41	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan OPD bidang ekonomi yang dikoordinasikan dan difasilitasi , Cakupan OPD bidang sosial budaya yang dikoordinasikan dan difasilitasi , Cakupan OPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang dikoordinasikan dan difasilitasi	BAPPEDA	
		42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	BPKAD	
		43	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		BPKAD	
		44	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		BAPENDA	
		45	Pengelolaan Pendapatan Daerah		BAPENDA	
		46	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kontrol Administrasi Keuangan	BAPENDA	
		47	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	INSPEKTORAT DAERAH	
		48	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan	INSPEKTORAT DAERAH	
		49	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi	INSPEKTORAT DAERAH	
		22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi, Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS DUKCAPIL	

		23	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah penduduk yang dilayani administrasi kependudukan (KTP KK)	DINAS DUKCAPIL	
		24	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah Penduduk yang dilayani Pencatatan Sipil	DINAS DUKCAPIL	
		25	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Laporan pengembangan data base kependudukan	DINAS DUKCAPIL	
		26	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Sistem Administrasi Kependudukan Yang dijalankan	DINAS DUKCAPIL	
		27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PMDPPKBPPPA	
		28	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase seluruh desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan administrasi desa	DINAS PMDPPKBPPPA	
		29	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase seluruh desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan administrasi desa, cakupan desa yang meningkat dalam pengelolaan pemerintahan desa, Jumlah desa yang memiliki Dokumen Perencanaan Tahunan sesuai standar	DINAS PMDPPKBPPPA	
		30	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, cakupan desa/ kel yang mendapatkan pembinaan kelembagaan ekonomi, cakupan desa yang menerapkan TTG	DINAS PMDPPKBPPPA	
		31	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah PUS yang terdaftar menjadi Peserta KB Aktif, Jumlah PIK KR yang terbentuk	DINAS PMDPPKBPPPA	
		32	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah BKB.BKR.BKL dan UPPKS yang dibina	DINAS PMDPPKBPPPA	

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Penetapan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja berdasarkan pada penentuan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2021, yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2021, dapat dijabarkan pada tabel 4.1 seperti dibawah ini.

TABEL 4.1

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan						Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)	OPD Pelaksana	Keterangan
1						2	3	4	5
1									
1	1								
1	01	01							
1	1	01	2	02					
1	1	01	2	02	01		239.326.020.028,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	2.05	5					

1	01	01	2.05	5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	55.162.500,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	2.06	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	01	01	2.06	6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis, 10 jenis	31.243.700,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	2.06	6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 OK	182.954.900,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	2.09	6	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Jenis	23.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	2.07	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	01	01	2.07	7	05	Pengadaan Mebel	3 Jenis	23.435.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	2.08	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	01	01	2.08	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Jenis, 150 org, 600 org, 1 dok	285.416.300,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	2.08	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	173.580.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	2.08	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Orang	36.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	2.09	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	01	01	2.09	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53 Unit	57.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	2.09	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Jenis	181.647.500,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02				Program Pengelolaan Pendidikan				
1	01	02	2	1		Pengelelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
1	01	02	2	1	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4 Ruang	856.025.700,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	1	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2 Ruang	149.934.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	1	06	Pembangunan sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah	4 Unit, 2 unit	2.118.945.650,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	1	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2 Unit	403.925.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	1	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8 RK	556.666.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	1	14	Pengadaan Mebel Sekolah	10 Set	164.540.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	1	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	5 Set	283.490.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	1	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	198 SP	19.549.103.300,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	1	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 Jenis	2.199.346.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	1	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	6925 Siswa	550.337.400,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	1	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	199 SP	72.679.200,00	DINAS PENDIDIKAN	

1	01	02	2	1	25	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	3780 Siswa	225.871.700,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	1	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	79 Orang	952.439.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	1	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	495 orang	455.191.400,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	1	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	323 Orang	69.731.200,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah menengah pertama				
1	01	02	2	2	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	5 RK	407.756.900,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	2	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Ruang	567.022.900,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	2	12	Pembangunan sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah	3 Unit, 1 ruang	1.286.131.300,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	2	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1 Ruang	149.678.500,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	2	25	Pengadaan Mebel Sekolah	10 Set	187.458.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	2	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	39 SMP	12.401.122.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	2	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 Jenis	337.765.750,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	2	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	3407 Siswa	404.666.400,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	2	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	20 SP	24.836.400,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	2	38	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	3780 Siswa	430.384.800,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	2	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23 Orang	278.282.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	2	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	244 orang	242.635.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	2	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120 Orang	51.563.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	3		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dina (PAUD)				
1	01	02	2	3	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2 Unit	260.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	3	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	10 SP	176.225.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	3	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	6542 Orang	4.163.352.400,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	3	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	655 Orang	5.975.379.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	3	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	200 Orang	133.413.400,00	DINAS PENDIDIKAN	

1	01	02	2	3	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	7 Dokumen, 250 ORG, 22 GUGUS	147.679.900,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2	4		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
1	01	02	2	4	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	100 WB, 1 LBG, 11 KLP, 100 WB, 1 JENIS	4.865.599.200,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	2					URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN				
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
1	2	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	2	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		42.115.538.842,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	02	1	2	5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32 orang	48.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	2	1	2	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	77.789.500,00	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	22	6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	342 buah	14.412.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2	6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	342 buah	2.050.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2	6	09	Penyediaan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	222 ok	737.287.500,00	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	2	1	2	7	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	95.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	2	1	2	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Jenis	976.656.724,00	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	3 Jenis	737.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2	8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39 unit	15.150.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	2	1	2	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38 unit	582.384.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2	9	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 unit	13.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				

1	02	02	2	1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota				
1	02	02	2	1	02	Pembangunan Puskesmas	8 pkm	7.498.414.960,24	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	1	07	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 unit	216.975.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	1	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12 pkm	811.135.769,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	1	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 jenis	36.320.700,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	1	16	Pengadaan Obat dan Vaksin	140 jenis	5.101.996.169,45	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	02	02	2	2	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	264.352.500,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2	02	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	717.382.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	35.328.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	29.898.500,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	5.332.500,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia produktif	100%	7.930.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	21.655.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	9.695.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	5.445.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	9.412.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	30.744.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	24.965.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana	3 kej	5.400.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100%	325.181.890,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 PKM. 200 sampel	67.900.500,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2	18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	5 Klp,2 media	60.550.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	12 pkm	2.440.563.500,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 pkm	159.521.500,00	DINAS KESEHATAN	

1	02	02	2	2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 pkm	55.400.809.742,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 pkm	124.827.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 pkm	10.238.173.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	5 pkm	777.677.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	2	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	55 desa/kel	377.576.700,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	3		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				
1	02	02	2	3	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah profil 13 Dok, 3 survey, monev 4 kali	34.373.380,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	03				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
1	02	03	2	3		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/kota				
1	02	03	2	3	02	Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	1 Dok	42.076.600,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	2	4		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	02	03	2	4	02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8 orang	7.740.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	04				Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan/Minuman				
1	02	04	2	1		Pemberian izin apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
1	02	04	2	1	01	Pengendalian dan pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan apotek, toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat tradisional (UMOT)	3 PKM	8.519.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	04	2	2		pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas I tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas I tertentu perusahaan rumah tangga				
1	02	04	2	2	01	pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas I tertentu dan PKRT kelas I tertentu perusahaan rumah tangga	12 PKM	489.559.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	04	2	6		Pemeriksaan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga				
1	02	04	2	6	06	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	5 kit	5.130.500,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	05				Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan				

1	02	05	2	1		Adovokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor				
1	02	05	2	1	01	Peningkatan Upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	12 pkm	32.227.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	2	5	2	2		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	2	5	2	2	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	24 Posyandu	86.939.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	1				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota				
1	2	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	2	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		20.406.322.437,00	RSUD	
1	02	02	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD				
1	02	02	2	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	76.215 orang	49.736.000.000,00	RSUD	
1	02	02				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat				
1	02	02	2	1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah				
1	02	02	2	1	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana & Prasarana Pendukungnya	1 Jenis	913.330.530,00	RSUD	
1	02	02	2	1	14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	125 Jenis	10.452.507.400,00	RSUD	
1	3					URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM				
1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
1	3	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	3	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.163.235.494,00	DINAS PUPR	
1	3	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	3	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5426 eks	280.462.050,00	DINAS PUPR	
1	3	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 rekeneing	39.600.000,00	DINAS PUPR	
1	3	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Orang	9.600.000,00	DINAS PUPR	
1	3	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		
1	3	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	-		

1	3	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 unit	93.286.000,00	DINAS PUPR	
1	3	01	2	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	16 unit	205.396.800,00	DINAS PUPR	
1	3	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	8.250.000,00	DINAS PUPR	
1	3	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	11.379.915,00	DINAS PUPR	
1	3	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		-		
1	3	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 jenis	1.936.000,00	DINAS PUPR	
1	3	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 Jenis	3.649.375,00	DINAS PUPR	
1	3	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57 OK	124.415.500,00	DINAS PUPR	
1	3	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		
1	3	01	2	07	03	Pengadaan Alat Besar	7 unit	79.000.000,00	DINAS PUPR	
1	3	01	2	07	05	Pengadaan Mebeleur	4 unit	19.550.000,00	DINAS PUPR	
1	3	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	33.000.000,00	DINAS PUPR	
1	3	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-		
1	3	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 orang	55.038.000,00	DINAS PUPR	
1	3	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
1	3	02	2	1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1	3	02	2	1	09	Pembangunan Tanggul Sungai	1800 meter	-	DINAS PUPR	
1	3	02	2	1	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2530 meter	-	DINAS PUPR	
1	3	02	2	1	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	3040 meter	949.923.703,95	DINAS PUPR	
1	3	02	2	1	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	150 meter	-	DINAS PUPR	
1	3	02	2	1	37	Peningkatan Kanal Banjir	3494 meter	1.699.107.058,82	DINAS PUPR	
1	3	02	2	1	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	500 meter	181.555.000,00	DINAS PUPR	
1	3	02	2	1	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	195 meter	216.401.000,00	DINAS PUPR	
1	3	02	2	1	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Paket	7.445.000,00	DINAS PUPR	
1	3	02	2	2		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				

1	3	02	2	2	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3 unit bendung + 1.030 m	449.931.000,00	DINAS PUPR	
1	3	02	2	2	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2 unit bendung + 3.850 m	964.532.000,00	DINAS PUPR	
1	3	02	2	2	03	Pembangunan Bendung Irigasi	1 Unit	189.635.000,00	DINAS PUPR	
1	3	02	2	2	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7 unit bendung + 3.400 m	6.797.302.500,00	DINAS PUPR	
1	3	02	2	2	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	8 D.I	615.123.000,00	DINAS PUPR	
1	3	10				Program Penyelenggaraan Jalan				
1	3	10	2	1		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
1	3	10	2	1	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	17 km	262.202.400,00	DINAS PUPR	
1	3	10	2	1	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	17 km	107.253.200,00	DINAS PUPR	
1	3	10	2	1	05	Pembangunan Jalan	17 km	14.729.145.400,00	DINAS PUPR	
1	3	10	2	1	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	2 km	221.566.700,00	DINAS PUPR	
1	3	10	2	1	12	Pembangunan Jembatan	2 unit	1.441.759.800,00	DINAS PUPR	
1	3	10	2	1	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	30 km	138.647.500,00	DINAS PUPR	
1	3	08				Program Penataan Bangunan Gedung				
1	3	08	2	1		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				
1	3	08	2	1	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5 unit	21.173.156.000,00	DINAS PUPR	
1	3	12				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				
1	3	12	2	1		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota				
1	3	12	2	1	01	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1 dokumen	1.734.292.900,00	DINAS PUPR	
1	3	12	2	3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				
1	3	12	2	3	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	7 kecamatan	70.419.300,00	DINAS PUPR	
1	03					DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	03	05				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				

1	03	05	2	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	03	05	2	01	03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	255 RT	1.593.865.000,00	DINAS PKP	
1	03	05	2	01	04	Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1 Unit	-	DINAS PKP	
1	03	05	2	01	10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	7 orang	104.118.500,00	DINAS PKP	
1	03	03				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
1	03	03	2	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
1	03	03	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		501.775.000,00	DINAS PKP	
1	03	03	2	01	06	Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan		1.101.675.300,00	DINAS PKP	
1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	04	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
1	4	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	4	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.243.602.415,00	DINAS PKP	
1	04	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	04	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Unit	49.588.200,00	DINAS PKP	
1	04	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16 Buah	5.079.900,00	DINAS PKP	
1	04	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	127 Buah	7.175.000,00	DINAS PKP	
1	04	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324 Kali	153.159.200,00	DINAS PKP	
1	04	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	04	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Jenis	52.395.250,00	DINAS PKP	
1	04	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4 Rek	63.000.000,00	DINAS PKP	
1	04	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 OB	9.600.000,00	DINAS PKP	
1	04	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	04	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	20.130.000,00	DINAS PKP	

1	04	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44 Unit	80.390.000,00	DINAS PKP	
1	04	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	3.915.000,00	DINAS PKP	
1	04	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	04	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Orang	32.476.000,00	DINAS PKP	
1	4	02				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
1	4	2	2	03		Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
1	4	2	2	03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	10 unit	100.375.000,00	DINAS PKP	
1	4	04				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
1	4	04	2	01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
1	4	04	2	01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	235 Unit	69.334.500,00	DINAS PKP	
1	04	05				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
1	04	05	2	01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
1	04	05	2	01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	4 Taman, 450 Titik, 2500 Meter	3.708.721.100,00	DINAS PKP	
1	5					URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	5					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1	5	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	5	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.380.540.500,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	2	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	5	2	2	8	1	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650 Surat	64.099.200,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	90.600.000,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	1	2	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	23.950.000,00	SATPOL PP & DAMKAR	

1	5	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Orang	10.490.000,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	5	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis	5.915.000,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	20.000.000,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	1	2	6	3	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Jenis	7.723.000,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	1	2	6	4	Sub-Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	260 OK	234.623.500,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	5	1	2	7	1	Pengadaan Mebel	4 Jenis	46.574.000,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	1	2	7	1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	9 Jenis	37.228.800,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	5	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22 Unit	181.457.250,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	1	2	9	1	Pemeliharaan Mebel	3 Jenis	10.662.000,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	1	2	9	1	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	6 Jenis	14.400.000,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	5	1	2	5	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6 Jenis	100.458.500,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Orang	91.679.000,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang	86.694.000,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	2				Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum				
1	5	2	2	1		Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				
1	5	2	2	1	1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umumPencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	365 Kali	43.350.000,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	2	2	1	2	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	6 Kawasan	17.050.000,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	2	2	1	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan ketertiban Umum	280 Orang	65.444.000,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	2	2	1	7	Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	30 Kali	19.112.000,00	SATPOL PP & DAMKAR	

1	5	2	2	1	8	Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan sarana Dan Prasarana Ketentraman dan ketertiban Umum	100 OK	792.025.000,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	2				Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum				
1	5	1	2	2		Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota				
1	5	2	2	2	2	Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan peraturan Bupati/Walikota	15 Sekolah	49.819.100,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	2	2	2	1	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	7 Kecamatan	34.217.600,00	SATPOL PP & DAMKAR	
5	5	2	2	2	1	Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan peraturan-peraturan Bupati/Walikota	12 Kali	46.095.000,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	4				Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran				
1	5	4	2	1		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran				
1	5	4	2	1	1	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	7 Kecamatan	28.962.500,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	4	2	1	2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	150 OK	1.462.200.000,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	4	2	1	6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	1 Unit	121.411.400,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	4	2	1	7	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	120 Orang	36.687.050,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	5	4	2	1	9	Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	1 Dokumen	7.578.000,00	SATPOL PP & DAMKAR	
1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota				
1	5	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	5	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.702.588.385,00	BPBD	
1	05	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	05	01	2	05	9	Sub-Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	36 pasang	19.800.000,00	BPBD	
1	05	01	2	05	10	Sub-Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4 orang	2.611.000,00	BPBD	
1	05	01	2	05	11	Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang	54.702.500,00	BPBD	
1	05	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	05	01	2	06	02	Sub-Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 unit	37.127.400,00	BPBD	

1	05	01	2	06	09	Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 kali, 256 kali	129.324.000,00	BPBD	
1	05	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	05	01	2	07	01	Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	42.525.000,00	BPBD	
1	05	01	2	07	05	Sub-Kegiatan Pengadaan Mebel	12 unit	9.755.000,00	BPBD	
1	05	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	05	01	2	08	01	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 jenis	57.797.500,00	BPBD	
1	05	01	2	08	02	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 rekening	64.800.000,00	BPBD	
1	05	01	2	08	04	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 org	9.600.000,00	BPBD	
1	05	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	05	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 unit,4 unit	43.450.000,00	BPBD	
1	05	01	2	09	05	Sub kegiatan Pemeliharaan mebel	19 buah	900.000,00	BPBD	
1	05	01	2	09	10	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 unit	1.210.000,00	BPBD	
1	05	01	2	09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	1.900.000,00	BPBD	
1	05	03				Program Penanggulangan Bencana				
1	05	03	2	01		Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota				
1	05	03	2	01	02	Sub-Kegiatan Sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)	2 jenis, 7 kecamatan	24.277.700,00	BPBD	
1	05	03	2	02		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
1	05	03	2	02	02	Sub-Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100 orang	92.200.500,00	BPBD	
1	05	03	2	02	08	Sub-Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	40 orang	43.264.800,00	BPBD	
1	05	03	2	02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	5 Jenis	37.100.000,00	BPBD	
1	05	03	2	02	07	Sub-Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten	30 orang, 1 dok RPP, 48 Unit, 30 unit, 1 dok, 50 jiwa, 10 unit, 5 unit	185.019.000,00	BPBD	
1	05	03	2	03		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
1	05	03	2	03	02	Sub-Kegiatan Respons Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	1 UNIT CRISIS CENTER	83.357.250,00	BPBD	

1	05	03	2	03	03	Sub-Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	0 jiwa, 10 unit	71.547.400,00	BPBD	
1	05	03	2	03	04	Sub-Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kabupaten /Kota	150 paket/kk	52.695.400,00	BPBD	
1	05	03	2	04		Kegiatan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana				
1	05	03	2	04	02	Sub-Kegiatan penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten	2 Desa	5.875.000,00	BPBD	
1	05	03	2	04	05	Sub-Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 kecamatan	2.088.800,00	BPBD	
1	5	04				Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran				
1	05	04	2	04		Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran				
1	05	04	2	04	01	Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	120 orang	24.646.500,00	BPBD	
1	6					URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL				
1	6	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
1	6	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	6	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.356.425.374,00	DINAS SOSIAL	
1	6	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	6	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Orang	35.552.000,00	DINAS SOSIAL	
1	6	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	6	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	3.570.000,00	DINAS SOSIAL	
1	6	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47 Unit	46.105.500,00	DINAS SOSIAL	
1	6	1	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	3.295.900,00	DINAS SOSIAL	
1	6	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224 OH	146.784.500,00	DINAS SOSIAL	
1	6	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	6	1	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Unit	10.588.500,00	DINAS SOSIAL	
1	6	1	2	8		Penyedia Jasa Urusan Pemerintah Daerah				
1	6	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1150	72.318.500,00	DINAS SOSIAL	
1	6	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Rekening	22.800.000,00	DINAS SOSIAL	
1	6	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

1	6	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	36.536.000,00	DINAS SOSIAL	
1	6	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	3.913.200,00	DINAS SOSIAL	
1	6	1	2	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Unit	4.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	6	2				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
1	6	2	2	3		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah				
1	6	2	2	3	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	10 Orang	21.513.800,00	DINAS SOSIAL	
1	6	4				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
1	6	4	2	1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
1	6	4	2	1	1	Penyediaan Permakanan	4 KASUS	27.198.600,00	DINAS SOSIAL	
1	6	4	2	1	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50 Orang	21.047.000,00	DINAS SOSIAL	
1	6	4	2	1	1	Penyediaan Permakanan	4 Kasus	45.647.600,00	DINAS SOSIAL	
1	6	4	2	1	1	Penyediaan Permakanan	4 Kasus	27.238.100,00	DINAS SOSIAL	
1	6	4	2	2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
1	6	4	2	2	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	400 ORANG	128.008.750,00	DINAS SOSIAL	
1	6	4	2	2	14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3 Kali	30.898.500,00	DINAS SOSIAL	
1	6	5				PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL				
1	6	5	2	2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
1	6	5	2	2	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10132 KPM/16556 KPM/103928 KK	259.318.650,00	DINAS SOSIAL	
1	6	5	2	2	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1 Unit/55 Orang	390.302.600,00	DINAS SOSIAL	
1	6	5	2	4	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10 KLP	20.319.000,00	DINAS SOSIAL	
1	6	6				PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
1	6	6	2	1		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
1	6	5	2	1	1	Penyediaan Makanan	1 Unit	40.214.000,00	DINAS SOSIAL	
1	6	5	2	1	4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	100 KK	76.656.900,00	DINAS SOSIAL	

1	6	6	2	2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				
1	6	5	2	2	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	10 Orang	60.918.500,00	DINAS SOSIAL	
1	6	7				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
1	6	7	2	1		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan				
1	6	7	2	1	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	7 Lokasi	41.999.000,00	DINAS SOSIAL	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
2	07	05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
2	07	05	2	2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				
2	07	05	2	2	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	40 Orang	7.887.000,00	DINAS PMPTSPNAKER	
2	07	05	2	2	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	40 Orang	7.432.000,00	DINAS PMPTSPNAKER	
2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
2	07	03	2	1		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi				
2	07	03	2	1	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	80 orang	526.304.000,00	DINAS PMPTSPNAKER	
2	8					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2	8	2				PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
2	8	2	2	1		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				
2	8	2	2	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		55.316.300,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	8	2	2	2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				

2	8	2	2	2	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	55 Desa/Kel, 7 Kec.	79.157.965,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	8	3				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
2	8	3	2	2		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
2	8	3	2	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		15.182.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	8	4				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
2	8	4	2	2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2	8	4	2	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		43.805.679,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	8	4	2	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		291.177.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	8	6				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
2	8	6	2	1		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
2	8	6	2	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		63.353.300,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	09					URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN				
2	09	01				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota				
2	9	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	9	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.151.092.225,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2	09	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	33.812.000,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2	09	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	2.155.000,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis	2.559.000,00	DINAS KET.PANGAN	

2	09	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90/42 Kali	123.240.000,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	09	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	2 Unit	3.750.000,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	1.968.200,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	27.441.700,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	09	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40 Jenis	40.731.440,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3 Rekening	20.700.000,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 OK	61.500.000,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	09	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	15.300.000,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11 Jenis	6.922.500,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Jenis	5.060.000,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	02				Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan				
2	09	02	2	01		Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
2	09	02	2	01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1 Unit	70.000.000,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	02	2	01	04	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	7 Kelompok	58.763.000,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	03				Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan				
2	09	03	2	01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lain sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
2	09	03	2	01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	6 Dokumen	38.004.900,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	03	2	01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	8 Klp	574.235.000,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	03	2	01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Laporan	32.499.900,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	03	2	01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	8 Gapoktan	42.773.400,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	03	2	01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	7 Kelompok	44.369.000,00	DINAS KET.PANGAN	

2	09	03	2	02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				
2	09	03	2	02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	8 Ton	75.682.500,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	03	2	04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				
2	09	03	2	04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	7 Klp/7Klp/1 Klp	146.938.400,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	03	2	04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	13 Dokumen	30.548.000,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	04				Penanganan Kerawanan Pangan				
2	09	04	2	02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				
2	09	04	2	02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Desa	101.988.000,00	DINAS KET.PANGAN	
2	09	05				Pengawasan Keamanan Pangan				
2	09	05	2	01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota				
2	09	05	2	01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100 Sampel	54.069.000,00	DINAS KET.PANGAN	
2	10					URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN				
2	10	05				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				
2	10	05	2	01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
2	10	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	2 Lokasi	5.928.900,00	DINAS PKP	
2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	11	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	11	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.199.725.476,00	DINAS LH	
2	11	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	11	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	610 Surat	34.630.700,00	DINAS LH	

2	11	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 Rekening	20.160.000,00	DINAS LH	
2	11	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Orang	9.600.000,00	DINAS LH	
2	11	01	2	08	03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	41.634.050,00	DINAS LH	
2	11	01	2	06		Administrasi Umum				
2	11	01	2	06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	4 Jenis	3.015.000,00	DINAS LH	
2	11	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74 Ok	74.934.500,00	DINAS LH	
2	11	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215 Oh	15.901.600,00	DINAS LH	
2	11	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	11	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Gedung	4.289.000,00	DINAS LH	
2	11	01	2	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	19.470.819,00	DINAS LH	
2	11	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	4.655.000,00	DINAS LH	
2	11	01	2	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	7.310.000,00	DINAS LH	
2	11	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2	11	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kali	41.774.000,00	DINAS LH	
2	11	2				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	02	2	01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				
2	11	02	2	01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dok	-	DINAS LH	
2	11	03				PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	03	2	01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
2	11	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	1 Dok	70.621.000,00	DINAS LH	
2	11	03				PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	03	2	1		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
2	11	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	6 lokasi	9.150.500,00	DINAS LH	
2	11	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Objek	21.920.500,00	DINAS LH	

2	11	03	2	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Dok	6.893.000,00	DINAS LH	
2	11	03	2	03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		-	DINAS LH	
2	11	03	2	03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	3 titik	75.351.500,00	DINAS LH	
2	11	03	2	03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Lokasi	3.752.000,00	DINAS LH	
2	11	04				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
2	11	04	2	01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
2	11	04	2	01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0,00005	60.750.000,00	DINAS LH	
2	11	04	2	01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0,05	136.119.000,00	DINAS LH	
2	11	05				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
2	11	05	2	01		Penyimpanan Sementara Limbah B3				
2	11	05	2	01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	1 Izin	2.632.000,00	DINAS LH	
2	11	05	2	2		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2	11	05	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	10 Loks	30.947.000,00	DINAS LH	
2	11	06				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan LH				
2	11	06	2	1		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
2	11	06	2	1	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	6 Objek	9.555.500,00	DINAS LH	
2	11	06	2	1	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Rekomendasi	27.320.500,00	DINAS LH	
2	11	07				Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait				
2	11	07	2	02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				
2	11	07	2	02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 KLP	10.977.000,00	DINAS LH	
2	11	08				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				

2	11	08	2	01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2	11	08	2	01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	3 Indikator	56.794.000,00	DINAS LH	
2	11	08	2	01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	2 SKLH	3.806.000,00	DINAS LH	
2	11	08	2	01	02	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	4 lokasi	43.358.500,00	DINAS LH	
2	11	08	2	01	02	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	1 PMRN	-	DINAS LH	
2	11	09				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
2	11	09	2	01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2	11	09	2	01	06	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 Lomba	10.575.000,00	DINAS LH	
2	11	10				Program penanganan pengaduan Lingkungan Hidup				
2	11	10	2	01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				
2	11	10	2	01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	1 Kasus	9.092.000,00	DINAS LH	
2	11	11				Program Pengelolaan Persampahan				
2	11	11	2	01		Pengelolaan Sampah				
2	11	11	2	01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	124 Unit	3.953.109.000,00	DINAS LH	
2	11	11	2	01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	8 MoU	16.005.500,00	DINAS LH	
2	11	11	2	01	01	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	1 Dok	31.738.000,00	DINAS LH	
2	11	11	2	3		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta				
2	11	11	2	03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	1 Dok	1.102.000,00	DINAS LH	
2	11	11	2	03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	1 Dok	22.661.504,00	DINAS LH	
2	11	11	2	03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	1 Dok	1.102.000,00	DINAS LH	
2	11	11	2	03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	1 Dok	1.102.000,00	DINAS LH	
2	11	11	2	03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	1 Dok	3.900.500,00	DINAS LH	
2	11	11	2	03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	1 Dok	1.102.000,00	DINAS LH	

2	11	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
2	11	11	2	01		Pengelolaan Persampahan				
2	11	11	2	01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	29 unit, 190 Org	2.973.700.000,00	DINAS PKP	
2	11	11	2	01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA/Kabupaten Kota	29 Unit	1.017.503.600,00	DINAS PKP	
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2	12	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	12	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	12	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.986.585.586,00	DINAS DUKCAPIL	
2	12	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2	12	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	4.447.500,00	DINAS DUKCAPIL	
2	12	1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	4.447.500,00	DINAS DUKCAPIL	
2	12	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	27.872.000,00	DINAS DUKCAPIL	
2	12	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2	12	1	2	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	555.000,00	DINAS DUKCAPIL	
2	12	1	2	6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11 Jenis	914.000,00	DINAS DUKCAPIL	
2	12	1	2	6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	41 Orang/Kali	56.135.700,00	DINAS DUKCAPIL	
2	12	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	12	1	2	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	12.540.000,00	DINAS DUKCAPIL	
2	12	1	2	7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	216.000.000,00	DINAS DUKCAPIL	
2	12	1	2	7	05	Pengadaan Mebel	4 Unit	5.300.000,00	DINAS DUKCAPIL	
2	12	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	12	1	2	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Jenis	106.022.900,00	DINAS DUKCAPIL	
2	12	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				

2	12	1	2	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21 Unit	34.380.000,00	DINAS DUKCAPIL	
2	12	1	2	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Unit	10.390.000,00	DINAS DUKCAPIL	
2	12	2				Program Pendaftaran Penduduk				
2	12	2	2	1		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
2	12	2	2	1	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	17602 Orang	768.274.000,00	DINAS DUKCAPIL	
2	12	3				Program Pencatatan Sipil				
2	12	3	2	1		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil				
2	12	3	2	1	02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	9307 Orang	229.723.000,00	DINAS DUKCAPIL	
2	12	4				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
2	12	4	2	3		Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
2	12	4	2	3	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7 Kecamatan	49.181.300,00	DINAS DUKCAPIL	
2	12	5				Program Pengelolaan Profil Kependudukan				
2	12	5	2	2		Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan				
2	12	5	2	2	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan lainnya	1 Buku	35.638.500,00	DINAS DUKCAPIL	
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2	13	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
2	13	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	13	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.248.255.655,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	1	2	5		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
2	13	1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	3 org	32.487.940,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2	13	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 buah	1.008.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	1	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 buah	506.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Jenis	117.980.200,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	13	1	2	7	10	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 jenis	33.750.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	

2	13	1	2	7	11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 Jenis	37.000.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	1	2	7	5	Pengadaan Mebeleur	3 Jenis	29.275.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	13	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17 Jenis	67.185.200,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	17.500.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2 org	9.600.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	13	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit	48.900.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	600.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	1	2	9	9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 jenis	7.800.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	3				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				
2	13	3	2	1		Fasilitasi Kerja sama antar Desa				
2	13	3	2	1	1	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	40 Desa	19.000.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	4				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
2	13	4	2	1		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				
2	13	4	2	1	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	40 Desa	802.751.908,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	4	2	1	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	40 Desa	65.000.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	4	2	1	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	40 Desa	10.000.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	4	2	1	5	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	40 Desa	26.000.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	4	2	1	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	40 Desa	60.000.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	4	2	1	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	40 Desa	70.000.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	4	2	1	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	40 Desa	99.980.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	4	2	1	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	40 Desa	35.465.500,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	4	2	1	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	40 Desa	36.715.500,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	4	2	1	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	12 Pasar Desa	13.230.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	5				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				

2	13	5	2	1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2	13	5	2	1	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		32.751.300,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	5	2	1	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		199.262.540,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	5	2	1	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		112.983.439,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	5	2	1	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		83.832.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	5	2	1	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		18.168.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	13	5	2	1	6	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		56.174.500,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA				
2	14	3				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
2	14	3	2	1		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				
2	14	3	2	1	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	2 Klp	21.000.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	14	3	2	1	5	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	100 Org	52.731.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	14	3	2	2		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				
2	14	3	2	2	3	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		657.120.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	14	3	2	3		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota				
2	14	3	2	3	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		2.435.196.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	

2	14	3	2	4		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				
2	14	3	2	4	1	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	200 orang	59.749.000,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	14	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
2	14	4	2	1		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
2	14	4	2	1	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7 Kec	16.842.685,00	DINAS PMDPPKBPPPA	
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
2	15	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.617.176.317,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2	15	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	107 orang	49.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3780	34.692.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 Orang	18.674.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2	15	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	1.484.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Orang	182.005.200,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	15	1	2	7	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan				
2	15	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	43.650.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 unit	9.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

2	15	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Surat	78.915.600,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10 Rekening	86.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	15	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	17 Kendaraan	125.307.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	2	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 unit	32.591.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
2	15	2	2	2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
2	15	2	2	2	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rambu 137 unit, marka 7150 meter, pagar pengaman 145 meter	111.975.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	2	2	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5676 meter	33.324.340,92	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	2	3		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				
2	15	2	2	3	1	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C				
2	15	2	2	3	2	Pembangunan Gedung Terminal	1 Paket			
2	15	2	2	3	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	2 paket	13.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	2	3	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	9 unit	19.297.500,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	2	5		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
2	15	2	2	5	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
2	15	2	2	6		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				
2	15	2	2	6	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota	4 Kegiatan	475.944.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	2	6	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	4 Sub kegiatan	139.520.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	2	6	3	Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	1 Kegiatan	6.065.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	2	8		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				
2	15	2	2	8	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	34.983.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	3				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				

2	15	3	2	12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				
2	15	3	2	12	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	10 unit	3.048.387.110,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
2	16	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				
2	16	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	16	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.726.890.516,00	DINAS KOMINFOSTAT	
2	16	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	16	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3780 Surat	133.859.900,00	DINAS KOMINFOSTAT	
2	16	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	16	1	2	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	6 STNK, 2 Unit	19.708.860,00	DINAS KOMINFOSTAT	
2	16	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2	16	1	2	6	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	2.326.900,00	DINAS KOMINFOSTAT	
2	16	1	2	6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 jenis	1.970.200,00	DINAS KOMINFOSTAT	
2	16	1	2	6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	44 OK, 150 Org	184.824.750,00	DINAS KOMINFOSTAT	
2	16	1	2	7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	16	1	2	7	06	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1 jenis	110.932.000,00	DINAS KOMINFOSTAT	
2	16	1	2	7	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	15 unit	3.500.000,00	DINAS KOMINFOSTAT	
2	16	1	2	5		Administrasi kepegawaian perangkat daerah				
2	16	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 orang	50.759.500,00	DINAS KOMINFOSTAT	
2	16	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 orang	41.347.000,00	DINAS KOMINFOSTAT	
2	16	2				Program Informasi dan Komunikasi Publik				
2	16	2	2	1	6	Pelayanan Informasi Publik	3 Jenis, 510 Org	1.132.056.500,00	DINAS KOMINFOSTAT	
2	16	2	2	1	7	Layanan Hubungan Media	24 media	485.042.000,00	DINAS KOMINFOSTAT	
2	16	2	2	1	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Lembaga	11.976.000,00	DINAS KOMINFOSTAT	
2	16	2	2	1	11	Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	7 jenis	21.338.000,00	DINAS KOMINFOSTAT	
2	16	2	2	1	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	10 orang	80.154.000,00	DINAS KOMINFOSTAT	

2	16	3				Program Aplikasi Informatika				
2	16	3	2	1		Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup pemerintah daerah				
2	16	3	2	1	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra pemerintah daerah	2 jenis	1.299.050.000,00	DINAS KOMINFOSTAT	
2	16	3	2	2		Pengelolaan E-Government Di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota				
2	16	3	2	2	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah daerah	5 Orang	210.000.000,00	DINAS KOMINFOSTAT	
2	16	3	2	2	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 kegiatan	40.165.000,00	DINAS KOMINFOSTAT	
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
2	17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2	17	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	17	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.884.845.884,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
2	17	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2	17	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Orang	65.331.000,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
2	17	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2	17	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 Jenis	24.322.000,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
2	17	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 OK	220.382.500,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
2	17	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	17	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	32.675.000,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
2	17	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	12.055.500,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
2	17	01	2	07	5	Pengadaan Mebel	54 Unit	76.950.000,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
2	17	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	17	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Surat	110.476.500,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
2	17	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11 rekening	51.600.000,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
2	17	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	17	01	2	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	29.197.500,00	DINAS KOP,UKM & DAG	

2	17	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	213.598.800,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
2	17	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	2.000.000,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
2	17	01	2	09	11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6.400.000,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
2	17	04				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
2	17	04	2	1		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2	17	04	2	1	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Koperasi	58.213.900,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
2	17	05				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
2	17	05	2	1		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
2	17	05	2	1	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	90 Orang	265.900.400,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
2	17	06				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
2	17	06	2	1		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
2	17	07	2	1	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	12 Produk	169.508.000,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
2	17	07	2	1	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1 Koperasi	27.920.000,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
2	17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
2	17	08	2	1		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
2	17	08	2	1	01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	107 UMK	309.941.600,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				
2	18	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	18	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.568.871.232,00	DINAS PMPTSPNAKER	
2	18	01	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

2	18	01	2	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 eks	31.386.900,00	DINAS PMPTSPNAKER	
2	18	01	2	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3	10.860.000,00	DINAS PMPTSPNAKER	
2	18	01	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2	18	01	2	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Jenis	2.266.000,00	DINAS PMPTSPNAKER	
2	18	01	2	6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	30.910.600,00	DINAS PMPTSPNAKER	
2	18	01	2	6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 OK	251.069.500,00	DINAS PMPTSPNAKER	
2	18	01	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	18	01	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 Unit	94.960.000,00	DINAS PMPTSPNAKER	
2	18	01	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	18	01	2	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	37.480.480,00	DINAS PMPTSPNAKER	
2	18	01	2	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	DINAS PMPTSPNAKER	
2	18	01	2	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29	8.350.000,00	DINAS PMPTSPNAKER	
2	18	01	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2	18	01	2	5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 Orang	27.519.500,00	DINAS PMPTSPNAKER	
2	18	01	2	5	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	55.130.500,00	DINAS PMPTSPNAKER	
2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
2	18	2	2	2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				
2	18	02	2	2	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	200 Buku	54.285.000,00	DINAS PMPTSPNAKER	
2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
2	18	03	2	1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
2	18	03	2	1	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3 Pameran	109.713.000,00	DINAS PMPTSPNAKER	
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
2	18	04	2	1		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
2	18	04	2	1	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Aplikasi	366.827.000,00	DINAS PMPTSPNAKER	
2	18	04	2	1	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	1.450 OK	145.373.000,00	DINAS PMPTSPNAKER	

2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
2	18	05	2	1		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
2	18	05	2	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	35 Laporan	60.314.000,00	DINAS PMPTSPNAKER	
2	18	05	2	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 kemitraan	180.550.200,00	DINAS PMPTSPNAKER	
2	18	05	2	1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	35 Laporan	81.708.800,00	DINAS PMPTSPNAKER	
2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
2	18	06	2	1		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2	18	06	2	1	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	5 Jenis	2.000.000,00	DINAS PMPTSPNAKER	
2	19					Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga				
2	19	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
2	19	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	19	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.488.969.894,00	DIKPORA	
2	19	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2	19	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	38.853.000,00	DIKPORA	
2	19	1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	17.396.000,00	DIKPORA	
2	19	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	13.475.000,00	DIKPORA	
2	19	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2	19	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	765.000,00	DIKPORA	
2	19	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	13.825.400,00	DIKPORA	
2	19	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	39.884.000,00	DIKPORA	
2	19	1	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Jenis	2.369.550,00	DIKPORA	
2	19	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102 Kali	191.178.700,00	DIKPORA	
2	19	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	19	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	8 Jenis	51.927.500,00	DIKPORA	
2	19	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

2	19	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Surat	59.058.000,00	DIKPORA	
2	19	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Rekening	13.800.000,00	DIKPORA	
2	19	1	2	8	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Jenis	5.650.000,00	DIKPORA	
2	19	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	19	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	17.506.880,00	DIKPORA	
2	19	1	2	9	5	Pemeliharaan Mebel	1 Unit	3.069.500,00	DIKPORA	
2	19	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	12.324.450,00	DIKPORA	
2	19	1	2	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	750.000,00	DIKPORA	
2	19	3				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
2	19	3	2	4		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				
2	19	3	2	4	1	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	5 Orang	19.000.000,00	DIKPORA	
2	19	3	2	4	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5 Organisasi	16.490.500,00	DIKPORA	
2	19	2				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
2	19	2	2	1		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
2	19	2	2	1	6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	1 Unit	136.600.000,00	DIKPORA	
2	19	3				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
2	19	3	2	1		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
2	19	3	2	1	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	7 Unit	200.400.000,00	DIKPORA	
2	19	3				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
2	19	3	2	3		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				
2	19	3	2	3	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	1 Kegiatan	20.610.000,00	DIKPORA	
2	19	3				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
2	19	3	2	2		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				

2	19	3	2	2	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1 Kegiatan	168.651.000,00	DIKPORA	
2	19	3	2	3		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				
2	19	3	2	3	1	Seleksi Atlet Daerah	1 Kegiatan	75.871.427,00	DIKPORA	
2	19	2				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
2	19	2	2	1		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
2	19	2	2	1	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	70 Orang	741.644.978,00	DIKPORA	
2	19	2				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
2	19	2	2	1		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
2	19	2	2	1	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	50 Orang	27.631.000,00	DIKPORA	
2	19	2	2,01	2	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	50 Orang	18.676.000,00	DIKPORA	
2	19	2	2,01	4	4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	100 orang	12.760.000,00	DIKPORA	
2	19	2	2,02			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Jenis			
2	19	2	2,02	1	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	3 Dokumen	33.939.000,00	DIKPORA	
2	19	2	2,02	2	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	3 OKP	180.053.000,00	DIKPORA	
2	19	2	2,02	2	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	50 Orang	14.887.000,00	DIKPORA	
2	19	2	2,02	2	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	100 Orang	16.494.500,00	DIKPORA	
2	19	2	2,02	2	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	50 Orang	1.110.351.000,00	DIKPORA	
2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				

2	20	2				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
2	20	2	2	1		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
2	20	2	2	1	3	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	6 dokumen	194.809.900,00	DINAS KOMINFOSTAT	
2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
2	21	2				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				
2	21	2	2	1		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
2	21	2	2	1	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 kegiatan	115.830.600,00	DINAS KOMINFOSTAT	
2	22					URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN				
2	22	02				Program Pengembangan Kebudayaan				
2	22	02	2	2		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2	22	02	2	2	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	6 Event	691.133.700,00	DINAS PENDIDIKAN	
2	22	02	2	2	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	75 Orang	96.491.300,00	DINAS PENDIDIKAN	
2	22	02	2	3		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2	22	02	2	3	03	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	1 Lbg	140.165.500,00	DINAS PENDIDIKAN	
2	22	03				Program Pengembangan Kesenian Tradisional				
2	22	03	2	1		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2	22	03	2	1	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	10 grup	376.554.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
2	22	05				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya				
2	22	05	2	1		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				
2	22	05	2	1	02	Pencegahan dan Penanggulangan dan Kerusakan dari kerusakan Cagar Budaya	1 Unit	169.326.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				

2	23	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota				
2	23	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	23	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.087.761.203,00	DINAS PERPUS & ARSIP	
2	23	01	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	23	01	2	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Surat	128.183.200,00	DINAS PERPUS & ARSIP	
2	23	01	2	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Rekening	32.340.000,00	DINAS PERPUS & ARSIP	
2	23	01	2	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Orang	9.600.000,00	DINAS PERPUS & ARSIP	
2	23	01	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2	23	01	2	6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	386.500,00	DINAS PERPUS & ARSIP	
2	23	01	2	6	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59 Kali	63.663.000,00	DINAS PERPUS & ARSIP	
2	23	01	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	23	01	2	7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional atau lapangan	2 Unit	20.000.000,00	DINAS PERPUS & ARSIP	
2	23	01	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	23	01	2	9	09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	9.811.000,00	DINAS PERPUS & ARSIP	
2	23	01	2	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	12 Unit	20.979.750,00	DINAS PERPUS & ARSIP	
2	23	01	2	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Unit	13.900.000,00	DINAS PERPUS & ARSIP	
2	23	01	2	9	05	Pemeliharaan Mebel	25 Unit	2.510.000,00	DINAS PERPUS & ARSIP	
2	23	01	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2	23	01	2	5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8 Orang	4.800.000,00	DINAS PERPUS & ARSIP	
2	23	01	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	45.745.000,00	DINAS PERPUS & ARSIP	
2	23	02				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
2	23	02	2	1		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/ Kota				
2	23	02	2	1	08	Pengembangan Bahan Pustaka	6 Abstrak/3 judul	15.169.000,00	DINAS PERPUS & ARSIP	
2	23	02	2	2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota				

2	23	02	2	2	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	7 Kecamatan/40 Orang	577.856.800,00	DINAS PERPUS & ARSIP	
2	24					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
2	24	02				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
2	24	02	2	1		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab. Barru				
2	24	02	2	1	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	13998 Dok	1.278.000,00	DINAS PERPUS & ARSIP	
2	24	02	2	2		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab. Barru				
2	24	02	2	2	01	Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI	2 Jenis	4.120.000,00	DINAS PERPUS & ARSIP	
2	24	02	2	2	02	Akuisisi Pengelolaan , Preservasi dan Akses Arsip Statis	50 Dokumen	7.950.500,00	DINAS PERPUS & ARSIP	
2	24	02	2	3		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten				
2	24	02	2	3	01	Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota melalui JIKN	1 Eks /70 Orang	7.609.000,00	DINAS PERPUS & ARSIP	
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN				
3	25	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
3	25	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
3	25	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.510.641.422,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	1	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
3	25	1	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 orang	36.793.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	1	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
3	25	1	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis, 1 paket	4.885.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	1	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis	3.700.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	1	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 kali, 75 Kali, 5 Kali, 12 bulan	242.443.500,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	1	2	07		Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
3	25	1	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	14.058.000,00	DINAS PERIKANAN	

	25	1	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
3	25	1	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 surat	9.354.800,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	1	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	1	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 orang	27.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	1	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
3	25	1	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	16 unit	39.900.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	1	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 unit	4.800.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	1	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	2.500.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	3				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				
3	25	3	2	01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
3	25	3	2	01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3 dokumen	52.166.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	3	2	01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	8 kelompok	350.597.500,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	3	2	02		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
3	25	3	2	02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	8 paket, 4 paket	655.450.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	3	2	02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	4 kelompok, 6 angkatan, 2 angkatan	264.644.550,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	3	2	03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				
3	25	3	2	03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 unit	98.556.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	3	2	06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
3	25	3	2	06	02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	50 surat	14.460.500,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	4				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
3	25	4	2	01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				

3	25	4	2	01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	50 surat	17.878.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	4	2	02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				
3	25	4	2	02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	6 paket, 12 unit	488.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	4	2	02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 kelompok	19.700.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	4	2	04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
3	25	4	2	04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 km	146.897.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	4	2	04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 kelompok	115.645.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	4	2	04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 kelompok	97.050.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	4	2	04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1 kawasan	111.735.050,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	4	2	04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1 lokasi	98.200.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	6				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
3	25	6	2	02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				
3	25	6	2	02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3 paket	73.519.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	6	2	03		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
3	25	6	2	03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 kelompok	42.724.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	6	2	03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 paket	135.102.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
3	26	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
3	26	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				

3	26	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.406.121.327,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				
3	26	01	2	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 surat	65.230.750,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 Rekening	50.160.000,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
3	26	01	2	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	1.484.000,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2	6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15 Jenis	1.105.000,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2	6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	362 Kali	134.908.500,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
3	26	01	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23 Unit	33.042.000,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 Unit	91.657.200,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
3	26	01	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	17.464.037,50	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 Unit	20.610.000,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	4.400.000,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 Unit	4.214.805,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 jenis	3.905.000,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
3	26	01	2	5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	27.872.000,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	02				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
3	26	02	2	3		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
3	26	02	2	3	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6 Objek	345.781.100,00	DINAS PARIWISATA	

3	26	02	2	3	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	60 Unit	2.093.577.500,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	02	2	3	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	40 Orang	50.818.000,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	03				Program Pemasaran Pariwisata				
3	26	03	2	1		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
3	26	03	2	1	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Media	129.799.900,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	03	2	1	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Kali	432.786.300,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	05				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
3	26	05	2	1		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				
3	26	05	2	1	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	240 Orang	589.616.700,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	05	2	1		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				
3	26	05	2	1	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Lokasi	87.380.650,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	05	2	1	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang	85.580.650,00	DINAS PARIWISATA	
3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
3	27	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
3	27	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
3	27	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9.886.990.938,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2	1		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
3	27	01	2	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Jenis	112.251.300,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
3	27	01	2	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Surat	67.387.400,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Orang	14.400.000,00	DINAS PERTANIAN	

3	27	01	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
3	27	01	2	9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27 Unit	21.975.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	27 Unit	5.900.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8 Unit	4.828.740,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit	2.400.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
3	27	01	2	6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 OK 187 OH	144.502.500,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Set	3.500.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2	6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15 Jenis	2.365.825,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
3	27	01	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	11.900.720,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 Unit	32.151.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
3	27	01	2	5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	11.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
3	27	02	2	3		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
3	27	2	2	3	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	332 Ton	459.446.600,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	02	2	2		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kab/ kota				
3	27	02	2	2	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	750 Ekor	157.322.500,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	02	2	5		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
3	27	2	2	5	04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	20 Orang	5.884.400,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	02	2	6		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				
3	27	02	2	6	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Kab/Kota lain	3 Klp	90.704.500,00	DINAS PERTANIAN	

3	27	02	2	6	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbemnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2 Ha	21.268.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	03				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
3	27	03	2	1		Pengembangan Prasarana Pertanian				
3	27	03	2	1	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	31.639 Ha	216.848.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	03	2	1	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1 Kawasan	641.913.500,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	03	2	2		Pembangunan Prasarana Pertanian			DINAS PERTANIAN	
3	27	03	2	2	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	7 Unit	2.040.260.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	03	2	2	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	4 Unit	517.980.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	03	2	2	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	700 M	155.980.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	03	2	2	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	3 Unit	394.980.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	03	2	2	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	240 Ekor	15.999.500,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	03	2	2	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	7 BPP	1.152.050.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	04				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
3	27	04	2	1		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
3	27	04	2	1	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3000 Dosis	262.055.050,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	04	2	2		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				
3	27	04	2	2	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	4 Kali	12.897.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	04	2	2	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	1 Dokumen	38.200.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	04	2	3		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				
3	27	04	2	3	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Unit	99.499.750,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	04	2	3	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	20 Orang	28.250.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	04	2	4		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				

3	27	04	2	4	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	100 Sampel	13.292.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	04	2	5		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				
3	27	04	2	5	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	1 Dokumen	70.603.800,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	05				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
3	27	05	2	1		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				
3	27	05	2	1	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	19 Kali	107.933.100,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	06				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
3	27	06	2	3		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan				
3	27	06	2	3	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	28 Kali	9.409.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	07				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
3	27	07	2	1		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				
3	27	07	2	1	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	63 Dokumen	273.873.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	07	2	1	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	90 Orang	107.229.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	07	2	1	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7 BPP	71.750.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
3	30	03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN		-		
3	30	03	2	1		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				
3	30	03	2	1	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 Pasar	265.276.600,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
3	30	03	2	1	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8 pasar	972.296.700,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
3	30	04				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
3	30	04	2	1		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				
3	30	04	2	1	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 bulan	52.243.000,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
3	30	06				PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
3	30	06	2	1		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan				
3	30	06	2	1	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	1 Kegiatan	162.217.300,00	DINAS KOP,UKM & DAG	

3	30	06	2	1	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	4 Kali	30.989.900,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
3	30	07				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
3	30	07	2	1		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				
3	30	06	2	1	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	8 pasar	10.166.900,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
3	31	02	2	1		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota				
3	31	02	2	1	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Keg	74.547.500,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
3	31	02	2	1	04	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	6 Kelompok	108.216.500,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
3	31	02	2	1	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dok	280.044.500,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
3	31	04				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
3	31	04	2	1		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				
3	31	04	2	1	01	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dok	49.618.500,00	DINAS KOP,UKM & DAG	
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4	1					SEKRETARIAT DAERAH				
4	1	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
4	1	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
4	1	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12.122.992.326,00	BAG.UMUM	
4	1	1	2	5		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
4	1	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13 orang	55.751.000,00	BAG.UMUM	
4	1	1	2	6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	1	1	2	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28 jenis	67.323.000,00	BAG.UMUM	
4	1	1	2	6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35 jenis	44.120.120,00	BAG.UMUM	

4	1	1	2	6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 jenis	157.958.000,00	BAG.UMUM	
4	1	1	2	6	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	32075 OK	1.433.275.000,00	BAG.UMUM	
4	1	1	2	6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103 OK, 8711 OK	1.294.878.000,00	BAG.UMUM	
4	1	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
4	1	1	2	7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit			
4	1	1	2	7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 unit			
4	1	1	2	7	05	Pengadaan Mebel	3 jenis	60.550.920,00	BAG.UMUM	
4	1	1	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 jenis, 6 jenis	168.485.000,00	BAG.UMUM	
4	1	1	2	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11 jenis, 3 jenis	796.448.920,00	BAG.UMUM	
4	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	1	1	2	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2735 surat, 41 jenis, 10 jenis	202.437.300,00	BAG.UMUM	
4	1	1	2	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	5.490.134.394,00	BAG.UMUM	
4	1	1	2	8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	509.655.040,00	BAG.UMUM	
4	1	1	2	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	588 orang	1.373.677.300,00	BAG.UMUM	
4	1	1	2	8	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 jenis	13.380.000,00	BAG.UMUM	
4	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	1	1	2	9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit	461.940.000,00	BAG.UMUM	
4	1	1	2	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	401.300.000,00	BAG.UMUM	
4	1	1	2	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit, 5 unit	826.575.500,00	BAG.UMUM	
4	1	1	2	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit, 3 unit, 7 jenis, 3 unit	631.620.000,00	BAG.UMUM	
4	1	1	2	11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
4	1	1	2	11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 jenis, 3 jenis, 5 jenis	329.300.000,00	BAG.UMUM	
4	1	1	2	11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 tahun	290.000.000,00	BAG.UMUM	
4	1	1	2	11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	95 kali	4.170.629.000,00	BAG.UMUM	
4	1	1	2	12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				
4	1	1	2	12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3 jenis	465.500.000,00	BAG.UMUM	

4	1	1	2	12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	3 jenis	340.000.000,00	BAG.UMUM	
4	1	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA				
4	1	01	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	1	01	2	8	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Surat	15.369.500,00	BAG.ADM.PEMBANGUNAN	
4	1	01	2	8	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5000 Lembar	3.460.000,00	BAG.ADM.PEMBANGUNAN	
4	1	01	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
4	1	01	2	6	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 OK	49.860.000,00	BAG.ADM.PEMBANGUNAN	
4	1	01	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
4	1	01	2	7	06	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	11.765.000,00	BAG.ADM.PEMBANGUNAN	
4	1	01	2	7	07	Sub Kegiatan : Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-		
4	1	01	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	1	01	2	9	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	9.000.000,00	BAG.ADM.PEMBANGUNAN	
4	1	01	2	9	06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Jenis	3.450.000,00	BAG.ADM.PEMBANGUNAN	
4	1	01	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
4	1	01	2	5	10	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-		
4	1	01	2	5	11	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	37.043.000,00	BAG.ADM.PEMBANGUNAN	
4	1	03	2			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
4	1	03	2	2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				
4	1	03	2	2	02	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	10 Kali	332.648.500,00	BAG.ADM.PEMBANGUNAN	
4	1	03	2	2	02	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	113 Kali	11.560.000,00	BAG.ADM.PEMBANGUNAN	
4	1	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA				
4	1	01	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	1	01	2	8	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Surat	9.951.000,00	BAG.PEMERINTAHAN	
4	1	01	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
4	1	01	2	6	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123 OK	94.855.000,00	BAG.PEMERINTAHAN	

4	1	01	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	1	01	2	9	06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Jenis	3.100.000,00	BAG.PEMERINTAHAN	
4	1	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
4	1	02	2	1		Administrasi Tata Pemerintahan				
4	1	02	2	1	01	Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Kali	33.081.500,00	BAG.PEMERINTAHAN	
4	1	02	2	1	01	Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan	44 Orang	127.125.500,00	BAG.PEMERINTAHAN	
4	1	02	2	1	02	Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	10 Pilar	88.488.000,00	BAG.PEMERINTAHAN	
4	1	02	2	1	03	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 kerjasama	58.867.000,00	BAG.PEMERINTAHAN	
4	1	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
4	1	03	2	2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				
4	1	03	2	2	03	Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	248.231.000,00	BAG.PEMERINTAHAN	
4	1	03	2	2	03	Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 kali	15.119.600,00	BAG.PEMERINTAHAN	
4	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA				
4	1	1	2	3		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
4	1	1	2	3	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Buku	3.645.000,00	BAG. HUKUM	
4	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
4	1	1	2	9	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan kendaraan,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	7.750.000,00	BAG. HUKUM	
4	1	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
4	1	1	2	5	11	Bimbingan Teknik lplementasi peraturan perundang Undangang	2 Orang	51.558.000,00	BAG. HUKUM	
4	1	2				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat				
4	1	2	2	3		Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum				
4	1	2	2	3	002	Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kordinasi	24.231.100,00	BAG. HUKUM	
4	1	2	2	3	001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	3 Jenis	36.998.500,00	BAG. HUKUM	
4	1	2	2	3	001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	10 Perda	299.999.200,00	BAG. HUKUM	
4	1	2	2	3	03	Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	7 kecamatan	57.060.500,00	BAG. HUKUM	
4	1	2	2	3	03	Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	10 Perda	44.917.500,00	BAG. HUKUM	

4	1	2	2	3	001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	3 Jenis	97.813.500,00	BAG. HUKUM	
4	1	2	2	3	002	Fasilitasi Bantuan Hukum	55 Desa/kel	36.713.600,00	BAG. HUKUM	
4	1	2	2	3	003	Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	1 kerja sama	34.379.000,00	BAG. HUKUM	
4	1	2	2	3	003	Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	142 WL	24.687.000,00	BAG. HUKUM	
4	1	2	2	3	002	Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	87.455.500,00	BAG. HUKUM	
4	1	2	2	3	002	Fasilitasi Bantuan Hukum	5 LHP	77.491.500,00	BAG. HUKUM	
4	1	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
4	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	1	1	2	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 surat	12.915.500,00	BAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
4	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
4	1	1	2	6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 OH	9.753.000,00	BAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
4	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	1	1	2	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	13.000.000,00	BAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
4	1	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
4	1	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	25.789.500,00	BAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
4	1	1	2	14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
4	1	1	2	14	01	Fasilitasi Keprotokolan	2 Jenis	177.836.000,00	BAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
4	1	1	2	14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Jenis	70.243.000,00	BAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
4	1	1	2	14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Jenis	139.872.000,00	BAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
4	1	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
4	1	01	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

4	1	01	2	8	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat menyurat	60 Surat	7.647.400,00	BAG. PEREKONOMIAN	
4	1	01	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
4	1	01	2	6	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214 OK	147.520.600,00	BAG. PEREKONOMIAN	
4	1	01	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	1	01	2	9	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	3 Unit	7.500.000,00	BAG. PEREKONOMIAN	
4	1	01	2	9	06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	3.100.000,00	BAG. PEREKONOMIAN	
4	1	01	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
4	1	01	2	5	02	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	14.211.000,00	BAG. PEREKONOMIAN	
4	1	02				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
4	1	02	2			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				
4	1	02	2	1	01	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Koordinasi	19.789.000,00	BAG. PEREKONOMIAN	
4	1	02	2	1	02	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	72.253.000,00	BAG. PEREKONOMIAN	
4	1	02	2	1	03	Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Koordinasi	68.376.500,00	BAG. PEREKONOMIAN	
4	1	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA				
4	1	01	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	1	01	2	8	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Surat	25.388.500,00	BAG. KESRA	
4	1	01	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
4	1	01	2	6	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Kali	146.339.500,00	BAG. KESRA	
4	1	01	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
4	1	01	2	7	06	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	21.216.000,00	BAG. KESRA	
4	1	01	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	1	01	2	9	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	10.200.000,00	BAG. KESRA	
4	1	01	2	9	06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	2.840.000,00	BAG. KESRA	
4	1	01	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
4	1	01	2	5	11	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	29.208.000,00	BAG. KESRA	

4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
4	01	02	2	2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				
4	01	02	2	2	01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Pembinaan	3.623.850.100,00	BAG. KESRA	
4	01	02	2	2	01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Pembinaan	4.816.403.000,00	BAG. KESRA	
4	01	02	2	2	01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Kegiatan	4.978.062.200,00	BAG. KESRA	
4	01	02	2	2	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	4 kali	3.079.074.000,00	BAG. KESRA	
4	01	02	2	2	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	5638 Orang	38.148.000,00	BAG. KESRA	
4	1	01				Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				
4	1	01	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	1	01	2	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Jenis	13.166.000,00	BAG. ORGANISASI	
4	1	01	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
4	1	01	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Ok	58.988.500,00	BAG. ORGANISASI	
4	1	01	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	1	01	2	9	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	5.500.000,00	BAG. ORGANISASI	
4	1	01	2	13		Penataan Organisasi				
4	1	01	2	13	1	PengelolaanKelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	26.337.800,00	BAG. ORGANISASI	
4	1	01	2	13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	53.010.300,00	BAG. ORGANISASI	
4	1	01	2	13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	36 OPD	59.874.000,00	BAG. ORGANISASI	
4	1	01	2	13	1	PengelolaanKelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	28.124.000,00	BAG. ORGANISASI	
4	1	01	2	13	1	PengelolaanKelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	27.501.000,00	BAG. ORGANISASI	
4	1	01	2	13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	36 OPD	27.132.500,00	BAG. ORGANISASI	
4	1	1				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
4	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	1	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Surat	13.931.600,00	BAG. PENG. BARJAS	
4	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
4	1	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 OK	69.987.700,00	BAG. PENG. BARJAS	

4	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	1	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	7.500.000,00	BAG. PENG. BARJAS	
4	1	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	1.450.000,00	BAG. PENG. BARJAS	
4	1	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	1	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 buah	20.450.000,00	BAG. PENG. BARJAS	
4	1	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
4	1	1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	134 orang	8.332.200,00	BAG. PENG. BARJAS	
4	1	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 OK	92.721.500,00	BAG. PENG. BARJAS	
4	1	3				Perekonomian dan Pembangunan				
4	1	3	2	3		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
4	1	3	2	3	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Paket	228.026.000,00	BAG. PENG. BARJAS	
4	1	3	2	3	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3 Jenis	75.450.000,00	BAG. PENG. BARJAS	
4	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
4	1	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
4	1	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12.178.691.761,00	SEK. DPRD	
4	2	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
4	02	01	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 Orang	89.635.000,00	SEK. DPRD	
4	02	01	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5 Orang	23.490.000,00	SEK. DPRD	
4	02	01	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
4	02	01	2	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	4.842.000,00	SEK. DPRD	
4	02	01	2	6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Jenis	8.000.000,00	SEK. DPRD	
4	02	01	2	6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	194.000.000,00	SEK. DPRD	
4	02	01	2	6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129/340 OK	429.231.000,00	SEK. DPRD	
4	02	01	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
4	02	01	2	7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Paket	494.270.620,00	SEK. DPRD	

4	02	01	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	02	01	2	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	398 eks	-	SEK. DPRD	
4	02	01	2	8	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Rekening	179.160.000,00	SEK. DPRD	
4	02	01	2	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Paket/Tahun	292.551.000,00	SEK. DPRD	
4	02	01	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	02	01	2	9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	48.720.000,00	SEK. DPRD	
4	02	01	2	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Unit	65.250.000,00	SEK. DPRD	
4	02	01	2	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	21.250.000,00	SEK. DPRD	
4	02	01	2	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Paket	1.226.432.635,00	SEK. DPRD	
4	02	01	2	15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				
4	02	01	2	15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	125 Pasang	194.400.000,00	SEK. DPRD	
4	02	01	2	15	03	Pelaksanaan Medical Check Up	25 Orang	113.050.000,00	SEK. DPRD	
4	02	01	2	16		Layanan Administrasi DPRD				
4	02	01	2	16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	72 Kali	138.010.000,00	SEK. DPRD	
4	02	01	2	16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	36 OB	1.020.000.000,00	SEK. DPRD	
4	02	02				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				
4	02	02	2	1		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD				
4	02	02	2	1	02	Pembahasan Rancangan Perda	15 Kali	33.000.000,00	SEK. DPRD	
4	02	02	2	1	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	150 OH	1.611.000.000,00	SEK. DPRD	
4	02	02	2	1	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	4 Ranperda	600.000.000,00	SEK. DPRD	
4	02	02	2	4		Peningkatan Kapasitas DPRD				
4	02	02	2	4	02	Bimbingan Teknis DPRD	25 Orang	944.912.500,00	SEK. DPRD	
4	02	02	2	4	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	36org/bln	126.000.000,00	SEK. DPRD	
4	02	02	2	4	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	108 org/bln	378.000.000,00	SEK. DPRD	
4	02	02	2	5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				

4	02	02	2	5	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	755 OH	66.300.000,00	SEK. DPRD	
4	02	02	2	5	03	Pelaksanaan Reses	3 Kali	1.231.550.000,00	SEK. DPRD	
4	02	02	2	8		Fasilitasi Tugas DPRD				
4	02	02	2	8	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	356 OK	1.756.054.000,00	SEK. DPRD	
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5	1					PERENCANAAN				
5	1	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
5	1	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
5	1	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.690.035.841,00	BAPPEDA	
5	1	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
5	1	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
5	1	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
5	1	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 orang	54.298.000,00	BAPPEDA	
5	1	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
5	1	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 jnis	1.530.000,00	BAPPEDA	
5	1	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 jenis	10.068.200,00	BAPPEDA	
5	1	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302 OK	352.632.800,00	BAPPEDA	
5	1	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
5	1	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	32.002.000,00	BAPPEDA	
5	1	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5	1	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4500 Surat	73.637.500,00	BAPPEDA	
5	1	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 rekening	64.200.000,00	BAPPEDA	
5	1	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5	1	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit	21.350.000,00	BAPPEDA	
5	1	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48 unit	19.250.000,00	BAPPEDA	

5	1	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	745.000,00	BAPPEDA	
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
5	01	02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				
5	01	02	2	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	500 orang ; 2 dokumen	56.086.000,00	BAPPEDA	
5	01	02	2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	602.817.400,00	BAPPEDA	
5	01	02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
5	01	02	2	02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	38.960.500,00	BAPPEDA	
5	01	02	2	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
5	01	02	2	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2 dokumen	8.027.000,00	BAPPEDA	
5	01	02	2	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12 dokumen	29.018.000,00	BAPPEDA	
5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
5	01	03	2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
5	01	03	2	01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 OPD	31.141.000,00	BAPPEDA	
5	01	03	2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 OPD	38.862.000,00	BAPPEDA	
5	01	03	2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 OPD	48.147.500,00	BAPPEDA	
5	01	03	2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
5	01	03	2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 OPD	37.203.500,00	BAPPEDA	
5	01	03	2	02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 OPD	39.870.000,00	BAPPEDA	
5	01	03	2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
5	01	03	2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 OPD	43.465.500,00	BAPPEDA	

5	01	03	2	03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 OPD	33.718.500,00	BAPPEDA	
5	02					KEUANGAN				
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
5	2	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
5	2	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7.596.126.597,00	BPKAD	
5	02	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5500 surat	398.642.400,00	BPKAD	
5	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17 unit	4.800.000,00	BPKAD	
5	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	3.930.000,00	BPKAD	
5	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288 kali	253.059.500,00	BPKAD	
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
5	02	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
5	02	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	6.770.375,00	BPKAD	
5	02	1	2	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 jenis	184.536.400,00	BPKAD	
5	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	29.848.000,00	BPKAD	
5	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24 unit	44.500.000,00	BPKAD	
5	02	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62 unit	32.950.000,00	BPKAD	
5	02	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
5	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
5	02	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8 org	101.479.000,00	BPKAD	
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
5	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				

5	02	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37 SKPD 12 Laporan	331.527.500,00	BPKAD	
5	02	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
5	02	02	2	01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				
5	02	02	2	01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Kali, 1 Dokumen	637.303.500,00	BPKAD	
5	02	02	2	01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dok	463.487.500,00	BPKAD	
5	02	02	2	02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				
5	2	2	2	2	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Perda			
5	02	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
5	02	02	2	03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				
5	02	02	2	03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 dok	635.531.500,00	BPKAD	
5	02	02	2	05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				
5	02	02	2	05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Keg	165.654.800,00	BPKAD	
5	02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
5	02	03	2	01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				
5	02	03	2	01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	10 SKPD	133.928.900,00	BPKAD	
5	02	3	2	01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	5 dokumen	317.959.100,00	BPKAD	
5	02	03	2	01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 DOK	12.307.000,00	BPKAD	
5	02	03	2	01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Perbup	179.823.000,00	BPKAD	
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
5	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
5	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.030.289.189,00	BAPENDA	
5	02	01	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5	02	01	2	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 surat	199.722.000,00	BAPENDA	

5	02	01	2	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 rekening	75.000.000,00	BAPENDA	
5	02	01	2	8	04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	1 orang	4.800.000,00	BAPENDA	
5	02	01	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5	02	01	2	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unit	34.600.000,00	BAPENDA	
5	02	01	2	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 jenis	9.375.000,00	BAPENDA	
5	02	01	2	9	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 gedung	6.050.000,00	BAPENDA	
5	02	01	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
5	02	01	2	6	01	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 jenis	950.000,00	BAPENDA	
5	02	01	2	6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 jenis	862.000,00	BAPENDA	
5	02	01	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231 kali	180.178.000,00	BAPENDA	
5	02	01	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
5	02	01	2	7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	2 jenis	19.669.000,00	BAPENDA	
5	02	02	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
5	02	02	2	5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 orang	58.739.500,00	BAPENDA	
5	02	04				Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5	02	04	2	1		Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5	02	04	2	1	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	4 jenis	554.947.000,00	BAPENDA	
5	02	04	2	1	03	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	7 kali	9.929.000,00	BAPENDA	
5	02	04	2	1	04	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	7 jenis	265.750.000,00	BAPENDA	
5	02	04	2	1	05	Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak daerah	1 dokumen	4.850.000,00	BAPENDA	
5	02	04	2	1	06	Pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan Basis data Pajak Daerah	1 sistem , 5 jenis	88.185.000,00	BAPENDA	
5	02	04	2	1	08	Penetapan wajib pajak daerah	1 dokumen	34.600.000,00	BAPENDA	
5	02	04	2	1	10	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	4 laporan	31.614.000,00	BAPENDA	
5	02	04	2	1	11	Penagihan Pajak Daerah	19 kali	392.156.500,00	BAPENDA	
5	02	04	2	1	13	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	11 kali	39.350.000,00	BAPENDA	
5	2	3				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				

5	2	3	2	1		Pengelolaan Barang Milik Daerah				
5	2	3	2	1	01	Penyusunan Standar Harga	1 buku	111.481.500,00	BAG.UMUM	
5	03					KEPEGAWAIAN				
5	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
5	03	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
5	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.810.749.968,00	BKPSDM	
5	03	01	2	5		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
5	03	01	2	5	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	24 orang	126.206.000,00	BKPSDM	
5	03	01	2	5	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 orang	14.371.000,00	BKPSDM	
5	03	01	2	6		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
5	03	01	2	6	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	2 jenis	7.711.200,00	BKPSDM	
5	03	01	2	6	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	142 orang (102,40)	208.489.500,00	BKPSDM	
5	03	01	2	7		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
5	03	01	2	7	05	Pengadaan Mebel	9 unit	18.440.000,00	BKPSDM	
5	03	01	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 unit	80.962.500,00	BKPSDM	
5	03	01	2	8		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5	03	01	2	8	01	Penyediaan jasa surat menyurat	3780 eks	107.144.600,00	BKPSDM	
5	03	01	2	9		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5	03	01	2	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19 unit (10,9)	23.801.000,00	BKPSDM	
5	03	01	2	9	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	21 unit	8.145.000,00	BKPSDM	
5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	02	2	1		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				
5	03	02	2	1	02	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	2 dokumen	22.253.500,00	BKPSDM	
5	03	02	2	1	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	276 orang (108,168)	435.483.400,00	BKPSDM	
5	03	02	2	1	06	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	125 orang	86.309.350,00	BKPSDM	

5	03	02	2	1	08	Fasilitasi lembaga profesi ASN	174 orang	7.804.000,00	BKPSDM	
5	03	02	2	1	11	Pengelolaan data kepegawaian	2 dokumen	5.948.600,00	BKPSDM	
5	03	02	2	2		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				
5	03	02	2	2	01	Pengelolaan mutasi ASN	281 orang	475.332.700,00	BKPSDM	
5	03	02	2	2	02	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	950 orang	161.650.800,00	BKPSDM	
5	03	02	2	2	03	Pengelolaan promosi ASN	3 dokumen	23.645.300,00	BKPSDM	
5	03	02	2	3		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				
5	03	02	2	3	04	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	33 orang (31,2)	128.175.000,00	BKPSDM	
5	03	02	2			Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				
5	03	02	2	4	02	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	3000 orang	24.684.500,00	BKPSDM	
5	03	02	2	4	04	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	300 orang	44.267.000,00	BKPSDM	
5	03	02	2	4	07	Pembinaan disiplin ASN	0,972	13.387.600,00	BKPSDM	
5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
5	04	02	2	2		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				
5	04	02	2	2	07	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	328 orang (168,10,150)	2.220.633.000,00	BKPSDM	
5	5					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
5	05	02	2	01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				
5	05	02	2	01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 dokumen	13.290.000,00	BAPPEDA	
5	05	02	2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				
5	05	02	2	04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 dokumen	32.179.000,00	BAPPEDA	
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6	01					INSPEKTORAT DAERAH				

6	1	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
6	1	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
6	1	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.119.663.358,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	1	2	6		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
6	1	1	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Jenis	11.049.424,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	34 Kali	156.435.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	1	2	8		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
6	1	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Surat/Laporan	50.325.400,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	2 Rekening	-		
6	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Orang	9.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	1	2	9		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
6	1	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 Unit	6.450.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	1	2	9	5	Pemeliharaan Mebel	15 Unit	2.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya	27 Unit	20.405.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	1	2	9	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	1 Kantor	35.273.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	1	2	7		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
6	1	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	4 Unit	99.488.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	7 Unit	35.365.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	1	2	5		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
6	1	1	2	5	9	Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi	36 Orang	855.180.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	36 Orang	436.064.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	2				Program Penyelenggaraan Pengawasan				
6	1	2	2	1		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
6	1	2	2	1	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	38 LHP	556.226.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	2	2	1	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	7 Laporan	158.209.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	2	2	1	3	Reviu Laporan Kinerja	54 LHP	185.935.500,00	INSPEKTORAT DAERAH	

6	1	2	2	1	4	Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	28.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	2	2	1	5	Pengawasan Desa	7 Laporan	170.225.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	2	2	1	6	Kerjasama Pengawasan Internal	3 Laporan	25.535.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	2	2	1	7	Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI & Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Laporan	192.835.500,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	2	2	1		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				
6	1	2	2	1	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	5 Laporan	35.975.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	2	2	1	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	40 Laporan	782.311.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	3				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				
6	1	3	2	1		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				
6	1	3	2	1	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 Dokumen	-		
6	1	3	2	1	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1 Laporan	38.698.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	3	2	2		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi				
6	1	3	2	2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	7 Laporan	107.766.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	3	2	2	2	Pendampingan dan Asistensi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6 Laporan	67.307.500,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	3	2	2	3	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Laporan	382.183.850,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	3	2	2	4	Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Dokumen	137.594.500,00	INSPEKTORAT DAERAH	
7						UNSUR KEWILAYAHAN				
7	01					KECAMATAN BARRU				
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.437.273.148,00	KEC. BARRU	
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22 Jenis, 17624 Lembar, 1201 OH, 104 org	646.900.950,00	KEC. BARRU	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Wifi/Speedy : 5 Rek, Air : 1 Rek, Listrik : 6 Rek	36.540.000,00	KEC. BARRU	

7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Orang	28.800.000,00	KEC. BARRU	
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	10.200.000,00	KEC. BARRU	
7	01	01	2	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Roda 4 : 7 Unit, Kendaraan Dinas Roda 2 : 11 Unit	86.000.000,00	KEC. BARRU	
7	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	3 Jenis	959.000,00	KEC. BARRU	
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 Jenis	15.779.770,00	KEC. BARRU	
7	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Jenis	3.872.500,00	KEC. BARRU	
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	3.056.400,00	KEC. BARRU	
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Jenis	14.880.000,00	KEC. BARRU	
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1080 OK, 1584 OK, 220 OK,	100.402.800,00	KEC. BARRU	
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
7	01	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24 Unit	118.661.000,00	KEC. BARRU	
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
7	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9 orang	39.453.500,00	KEC. BARRU	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Des/Kel	10.254.000,00	KEC. BARRU	
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 SOP	733.100,00	KEC. BARRU	
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 kegiatan	92.676.500,00	KEC. BARRU	
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Unit	1.464.219.300,00	KEC. BARRU	
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Klp	285.780.450,00	KEC. BARRU	

7	01	03	2	02	04	Evaluasi Kelurahan	10 Des/Kel	3.558.000,00	KEC. BARRU	
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
7	01	03	2	03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	84 Lembaga	201.690.000,00	KEC. BARRU	
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 aduan	21.740.000,00	KEC. BARRU	
7	01					KECAMATAN TANETE RILAU				
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.161.810.170,00	KEC. TANETE RILAU	
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
7	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8 orang	38.347.500,00	KEC. TANETE RILAU	
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	1.711.000,00	KEC. TANETE RILAU	
7	01	01	2	06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	18 jenis	4.214.725,00	KEC. TANETE RILAU	
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Jenis	6.960.000,00	KEC. TANETE RILAU	
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 jenis, 60 mtr, 6000 lembar,38 orang, 8399 OH	110.912.100,00	KEC. TANETE RILAU	
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
7	01	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 jenis	31.493.400,00	KEC. TANETE RILAU	
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22 jenis, 60 mtr, 6000 lembar,38 orang, 8399 OH	249.271.650,00	KEC. TANETE RILAU	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Wife 3 rek. Air. 2 rek. 3 rek	32.820.000,00	KEC. TANETE RILAU	
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

7	01	01	2	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	roda 4 : 3 unit, roda 2 : 3 unit	22.555.000,00	KEC. TANETE RILAU	
7	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	3 Jenis	2.340.890,00	KEC. TANETE RILAU	
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 paket	13.827.000,00	KEC. TANETE RILAU	
7	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Jenis	6.550.000,00	KEC. TANETE RILAU	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Des/Kel	6.792.000,00	KEC. TANETE RILAU	
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 SOP	431.600,00	KEC. TANETE RILAU	
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 kegiatan	148.096.400,00	KEC. TANETE RILAU	
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 paket	642.400.000,00	KEC. TANETE RILAU	
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24 orang	57.600.000,00	KEC. TANETE RILAU	
7	01	03	2	02	04	Evaluasi Kelurahan	10 Des/Kel	6.528.000,00	KEC. TANETE RILAU	
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
7	01	03	2	03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	22 Lembaga	52.800.000,00	KEC. TANETE RILAU	
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 unit	19.920.800,00	KEC. TANETE RILAU	
7	01					KECAMATAN TANETE RIAJA				
7	1	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.111.174.287,00	KEC. TANETE RIAJA	

7	1	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7	1	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	264 OB, 84 jenis, 12.020 lbr, 8399 OK	144.242.100,00	KEC. TANETE RIAJA	
7	1	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 rekening	26.700.000,00	KEC. TANETE RIAJA	
7	1	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7	1	01	2	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Roda 4 : 3 Unit & Roda 2 : 4 unit	27.100.000,00	KEC. TANETE RIAJA	
7	1	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 jenis	4.686.000,00	KEC. TANETE RIAJA	
7	1	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 jenis	3.000.000,00	KEC. TANETE RIAJA	
7	1	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7	1	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65 buah	1.403.000,00	KEC. TANETE RIAJA	
7	1	1	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11 jenis, 10 kali, 7 lusin	3.660.000,00	KEC. TANETE RIAJA	
7	1	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Jenis	5.100.000,00	KEC. TANETE RIAJA	
7	1	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 OK, 444 OK, 528 OK, 434 OK	149.309.200,00	KEC. TANETE RIAJA	
7	1	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
7	1	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Jenis	13.082.000,00	KEC. TANETE RIAJA	
7	1	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1.700.000,00	KEC. TANETE RIAJA	
7	1	01	2	07	5	Pengadaan Mebel	2 jenis	8.000.000,00	KEC. TANETE RIAJA	
7	1	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
7	1	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 OK	35.277.000,00	KEC. TANETE RIAJA	
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	168 Orang/bulan, 3 jenis, 51 lembar	12.715.500,00	KEC. TANETE RIAJA	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Desa/Kel.	3.954.000,00	KEC. TANETE RIAJA	

7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 SOP	500.000,00	KEC. TANETE RIAJA	
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Kegiatan	98.435.700,00	KEC. TANETE RIAJA	
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Paket/unit	260.432.938,05	KEC. TANETE RIAJA	
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 kelompok	89.565.000,00	KEC. TANETE RIAJA	
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan				
7	01	06	2	01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemsyarakatan	4 kegiatan	20.618.000,00	KEC. TANETE RIAJA	
7	01					KECAMATAN PUJANANTING				
7	01	01	2	08		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.997.237.822,00	KEC. PUJANANTING	
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 orang, 29 jenis, 8626 , 27 Orang 100 %	142.493.800,00	KEC. PUJANANTING	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Wifi: 1 Rek Air : 2 Rek Listrik : 2 Rek 100%	15.360.000,00	KEC. PUJANANTING	
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 orang 100 %	4.800.000,00	KEC. PUJANANTING	
7	01	01	2	08	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 unit	3.250.000,00	KEC. PUJANANTING	
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Roda 4: 3 unit, roda 2: 2 unit	20.950.000,00	KEC. PUJANANTING	
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	1.973.500,00	KEC. PUJANANTING	
7	01	01	2	06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	2 unit	1.060.000,00	KEC. PUJANANTING	

7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 Jenis	3.060.000,00	KEC. PUJANANTING	
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 ok, 8342 ok/oh	75.752.500,00	KEC. PUJANANTING	
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
7	01	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	2 Jenis	19.500.000,00	KEC. PUJANANTING	
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
7	01	01	2	05	09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	26.426.000,00	KEC. PUJANANTING	
7	01	02				Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
7	01	02	2	1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Des/Kel	8.612.800,00	KEC. PUJANANTING	
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 SOP	105.000,00	KEC. PUJANANTING	
7	01	03				Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
7	01	03	2	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7	01	03	02	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 unit	322.000.000,00	KEC. PUJANANTING	
7	01	03	02	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 jenis	3.000.000,00	KEC. PUJANANTING	
7	01	03	02	02	04	Evaluasi Kelurahan	7 Desa/Kel	550.000,00	KEC. PUJANANTING	
7	01	03	2	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
7	01	03	02	03	01	Penyelenggaraan lembaga Kemasyarakatan	11 Kegiatan	122.515.400,00	KEC. PUJANANTING	
7	01	04				Ketenteraman Dan Ketertiban Umum				
7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
7	01	04	02	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 aduan	16.200.000,00	KEC. PUJANANTING	
7	01					KECAMATAN SOPPENG RIAJA				
7	1	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.094.120.932,00	KEC. SOPPENG RIAJA	

7	1	01	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
7	1	01	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 orang	26.426.000,00	KEC. SOPPENG RIAJA	
7	1	01	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7	1	01	2	6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Jenis	8.400.000,00	KEC. SOPPENG RIAJA	
7	1	01	2	6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 OK	81.329.200,00	KEC. SOPPENG RIAJA	
7	1	01	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7	1	01	2	7	05	Pengadaan Mebel	6 Jenis	15.425.000,00	KEC. SOPPENG RIAJA	
7	1	01	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit	28.120.000,00	KEC. SOPPENG RIAJA	
7	1	01	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7	1	01	2	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 paket	109.597.300,00	KEC. SOPPENG RIAJA	
7	1	01	2	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Rekening	28.200.000,00	KEC. SOPPENG RIAJA	
7	1	01	2	8	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2.550.000,00	KEC. SOPPENG RIAJA	
7	1	01	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				
7	1	01	2	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	33.350.000,00	KEC. SOPPENG RIAJA	
7	1	01	2	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2.318.300,00	KEC. SOPPENG RIAJA	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
7	01	02	2	1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7	01	02	2	1	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Desa/Kelurahan	4.052.400,00	KEC. SOPPENG RIAJA	
7	01	02	2	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan				
7	01	02	2	2	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7 Desa/Kelurahan	331.300,00	KEC. SOPPENG RIAJA	
7	01	02	2	4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat				
7	01	02	2	4	01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	7 Desa/Kelurahan	241.500,00	KEC. SOPPENG RIAJA	
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN				
7	01	03	2	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7	01	03	2	2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Kegiatan	75.951.000,00	KEC. SOPPENG RIAJA	

7	01	03	2	2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Paket	589.508.680,00	KEC. SOPPENG RIAJA	
7	01	03	2	2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Kelompok	110.491.000,00	KEC. SOPPENG RIAJA	
7	01	03	2	2	04	Evaluasi Kelurahan	7 Desa/Kelurahan	3.746.400,00	KEC. SOPPENG RIAJA	
7	01	03	2	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
7	01	03	2	3	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	14 Aduan	96.000.000,00	KEC. SOPPENG RIAJA	
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
7	01	04	2	1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
7	01	04	2	1	01	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	17.080.000,00	KEC. SOPPENG RIAJA	
7	01					KECAMATAN BALUSU				
7	1	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.708.841.952,00	KEC. BALUSU	
7	1	1	2	5		Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah				
7	1	1	2	5	9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	5 orang	30.343.500,00	KEC. BALUSU	
7	1	1	2	6		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah				
7	1	1	2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13 Jenis	912.000,00	KEC. BALUSU	
7	1	1	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Jenis	598.000,00	KEC. BALUSU	
7	1	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis	1.320.000,00	KEC. BALUSU	
7	1	1	2	6	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	466 OK	74.831.400,00	KEC. BALUSU	
7	1	1	2	7		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah				
7	1	1	2	7	10	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	4 Jenis	21.405.000,00	KEC. BALUSU	
7	1	1	2	7	05	Pengadaan Mebel	28 unit	6.500.000,00	KEC. BALUSU	
7	1	1	2	8		Penyedia Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah				
7	1	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	30 jenis, 9.500 lbr, 36 Pegawai, 18 org	123.294.400,00	KEC. BALUSU	
7	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Telepon : 2 rek, Listrik : 2 rek	21.417.720,00	KEC. BALUSU	

7	1	1	2	8	6	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Orang	9.600.000,00	KEC. BALUSU	
7	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				
7	1	1	2	9	8	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan, kendaraan dinas Operasional atau lapangan	10 Unit	15.465.020,00	KEC. BALUSU	
7	1	1	2	9	9	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 unit	1.350.000,00	KEC. BALUSU	
7	1	1	2	9	5	Pemeliharaan mebel	2 unit	527.750,00	KEC. BALUSU	
7	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Unit	4.515.650,00	KEC. BALUSU	
7	1	2				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
7	1	2	2	1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat kecamatan				
7	1	2	2	1	2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	6 Desa/Kel	2.380.000,00	KEC. BALUSU	
7	1	3				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
7	1	3	2	2		Pemberdayaan kelurahan				
7	1	3	2	2	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1 Paket	104.880.300,00	KEC. BALUSU	
7	1	3	2	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Paket	195.378.250,00	KEC. BALUSU	
7	1	3	2	2	3	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	33 Klp	154.621.750,00	KEC. BALUSU	
7	1	3	2	2	4	Evaluasi Kelurahan		2.380.000,00	KEC. BALUSU	
7	1	3	2	3		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan				
7	1	3	2	3	5	Penyelenggaraan lembaga-lembaga Kemasyarakatan	4 Kali	36.600.000,00	KEC. BALUSU	
7	1	4				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				
7	1	4	2	1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum				
7	1	4	2	1	1	Sinergitas dengan kepolisian Negara republik Indonesia dan instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	14 Org	14.752.000,00	KEC. BALUSU	
7	01					KECAMATAN MALLUSETASI				
7	1	01				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.840.099.646,00	KEC. MALLUSETASI	
7	1	01	2	08		Penyedia Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah				

7	1	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 jenis	300.457.100,00	KEC. MALLUSETASI	
7	1	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	132 rekening	42.967.416,00	KEC. MALLUSETASI	
7	1	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18 unit	13.700.000,00	KEC. MALLUSETASI	
7	1	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 orang	24.000.000,00	KEC. MALLUSETASI	
7	1	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7	1	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 jenis	10.920.000,00	KEC. MALLUSETASI	
7	1	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		203.360.400,00	KEC. MALLUSETASI	
7	1	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7	1	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27 unit	54.349.994,00	KEC. MALLUSETASI	
7	1	01	2	09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 unit	14.050.000,00	KEC. MALLUSETASI	
7	1	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				
7	1	01	2	07	7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 jenis	123.784.200,00	KEC. MALLUSETASI	
7	1	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
7	1	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	5 orang	28.850.000,00	KEC. MALLUSETASI	
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
7	01	03	02	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7	01	03	02	02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	8 desa/kel	110.348.500,00	KEC. MALLUSETASI	
7	01	03	02	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
7	01	03	02	03	01	Penyelenggaraan Lembaga Lembaga Kemasyarakatan	4 lembaga	190.653.600,00	KEC. MALLUSETASI	
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
7	01	04	02	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
7	01	04	02	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 unit	18.704.000,00	KEC. MALLUSETASI	
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
7	01	03	02	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7	01	03	02	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 UNIT	837.220.521,00	KEC. MALLUSETASI	

7	01	03	02	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 KLP	212.173.600,00	KEC. MALLUSETASI	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 desa /kel	4.690.000,00	KEC. MALLUSETASI	
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8	01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
8	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
8	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
8	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.688.965.963,00	BADAN KESBANGPOL	
8	01	01	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.				
8	01	01	2	5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.	8 Orang	59.872.500,00	BADAN KESBANGPOL	
8	1	01	2	66		Administrasi Umum Perangkat Daerah.				
8	01	01	2	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	5 Jenis	1.482.500,00	BADAN KESBANGPOL	
8	01	01	2	6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis	1.703.500,00	BADAN KESBANGPOL	
8	01	01	2	6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	329 Kali	136.333.200,00	BADAN KESBANGPOL	
8	01	01	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah.				
8	01	01	2	7	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	5 Jenis	31.043.600,00	BADAN KESBANGPOL	
8	01	01	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.				
8	01	01	2	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	210 Surat	43.903.000,00	BADAN KESBANGPOL	
8	01	01	2	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	18.600.000,00	BADAN KESBANGPOL	
8	01	01	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.				
8	01	01	2	9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	5 Unit	37.391.520,00	BADAN KESBANGPOL	
8	01	01	2	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	4 Unit	1.000.000,00	BADAN KESBANGPOL	
8	01	02				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA				
8	01	02	2	1		Perumusan Kebijakan Tekhnis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.				

8	01	02	2	1	03	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	100 Orang	20.435.500,00	BADAN KESBANGPOL	
8	01	03				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.				
8	01	03	2	1		Perumusan Kebijakan Tekhnis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik.				
8	01	03	2	1	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi di Daerah.	63 Ormas/Orpol	524.639.650,00	BADAN KESBANGPOL	
8	01	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.				
8	01	04	2	1		Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.				
8	01	04	2	1	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	55 Ormas	8.300.000,00	BADAN KESBANGPOL	
8	01	04	2	1	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	55 Ormas	32.785.600,00	BADAN KESBANGPOL	
8	01	05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA.				
8	01	05	2	1		Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.				
8	01	05	2	1	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	200 Orang	54.501.900,00	BADAN KESBANGPOL	
8	01	06				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.				
8	01	06	2	1		Perumusan kebijakan tekhnis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.				

8	01	06	2	1	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antara Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.	8 Tim	112.614.100,00	BADAN KESBANGPOL	
8	01	06	2	1	06	Pelaksanaan Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota.	7 Fokmas / Forkopimda	161.548.800,00	BADAN KESBANGPOL	
JUMLAH TOTAL								838.866.068.041,93		

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Peruntukan belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, hal yang terkait dengan tambahan penghasilan PNS disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Belanja bunga diperuntukan bagi pembayaran kewajiban pinjaman daerah yang terdiri dari hutang

Belanja Bantuan Sosial diperuntukan kepada bantuan organisasi kemasyarakatan, bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dan bantuan sosial kepada masyarakat dan seterusnya.

Belanja Tidak terduga diperuntukan untuk belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	Belanja Pegawai	427.046.274.110
2	Belanja Barang dan Jasa	289.386.067.823
3	Belanja Bunga	3.191.298.036
4	Belanja Subsidi	-
5	Belanja Hibah	14.804.220.650
6	Belanja Bantuan Sosial	-
7	Belanja Modal	107.629.505.459
8	Belanja Tidak Terduga	12.083.800.456
9	Belanja Bagi Hasil	-
10	Belanja Bantuan Keuangan	107.273.105.747
	TOTAL	961.414.272.281

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan daerah, yang terkait dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya baru dapat diketahui setelah akhir tahun anggaran. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah, dialokasikan pada penyertaan atau investasi daerah dan pembayaran hutang.

Tabel 5.1

**Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2021**

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
	<u>PEMBIAYAAN DAERAH</u>	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	10.183.000.000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10.183.000.000
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3.053.031.264
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.053.031.264
	<u>Pembiayaan Neto</u>	<u>4.129.968.736</u>

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Barru, Oktober 2020

PIMPINAN DPRD
KETUA

Plt. BUPATI BARRU

LUKMAN. T

Ir. H. NASRUDDIN. AM, M.Si

DAFTAR ISI

Hal

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	1
1.2	Tujuan Penyusunan dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS)	2
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	2
BAB II	RENCANA PENERIMAAN DAERAH.....	5
2.1	Target Pendapatan Daerah.....	5
2.2	Kebijakan Pendapatan Daerah Dalam KUA.....	6
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	7
3.1	Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Barru Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	8
3.2	Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Barru Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi.....	27
3.3	Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah.....	40
3.4	Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	52
BAB IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM.....	116
4.1	Plafon Anggaran Sementara menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	116
4.2	Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.....	193
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....	194
5.1	Rincian plafon Anggaran Pembiayaan TA 2021.....	194
BAB VI	PENUTUP	

TABEL 3.4

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan Disiplin dan Kapasitas SDM	5 Orang	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/kursus	5 orang	Baru		
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Jenis	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	3 Jenis, 10 jenis	Baru		
		Persentase jumlah staf yang mengikuti diklat teknis/fungsional	100%				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pengadaan peralatan kantor	54 OK	Baru		
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah ASN yang mengikuti rakor dan konsultasi	4 Jenis	Baru		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Jenis	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebeleur kantor	3 Jenis	Baru	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis penyediaan jasa surat menyurat	4 Jenis, 150 org, 600 org, 1 dok	Baru	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	3 Jenis	Baru		
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan dan pelayanan keamanan Kantor	4 Orang	Baru		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional	53 Unit	Baru	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor	4 Jenis	Baru		
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi	35 Lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dina (PAUD)	Jumlah lembaga PAUD yang memiliki Gedung Permanen	3 Lembaga	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Unit Gedung Sekolah PAUD terbangun	2 Unit	Tersebar		
		APK SD/SDLB	100,00%		Persentase Lembaga PAUD yang difasilitasi BOP	100%	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah PAUD yang diadakan Sarana dan Prasarana Bermain	10 SP	Tersebar		
		APK SMP/Paket B	100,00%				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang mendapatkan BOP PAUD	6542 Orang	Kab.Baru		
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	100,00%				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Cakupan Pendidik PAUD yang mendapatkan insentif	655 Orang	Tersebar		
		Cakupan Angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun	96,70%				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru PAUD yang mengikuti Pelatihan	200 Orang	Tersebar		
		Rasio guru/murid per kelas Pendidikan Dasar	0,045				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Dokumen PAUD yang dibukukan	7 Dokumen, 250 ORG, 22 GUGUS	Kab.Baru		
		Jumlah PTK yang menerima sertifikasi	1360 Orang	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Lulusan SD/MI	100%	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah yang terbangun	4 Ruang	Kab.Baru		
		Jumlah PTK yang berijazah S1/D4	1765 Orang		Jumlah Jenis Pengelolaan Sistem Pendidikan Sekolah Dasar	3 Jenis	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS SD yang terbangun	2 Ruang	Kab.Baru		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Cakupan Satuan Pendidikan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	100%		Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga	100%	Pembangunan sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah	Jumlah Taman, Lapangan Upacara, Fasilitas Parkir dan pagar SD yang terbangun-Jumlah Sarana Air Bersih/Sanitary SD yang terbangun	4 Unit, 2 unit	Kab.Barru	
							Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Sekolah SD yang terbangun	2 Unit	Kab.Barru	
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah RK SD yang direhabilitasi	8 RK	Kab.Barru	
							Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel SD	10 Set	Kab.Barru	
							Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Buku Teks/Pelajaran SD	5 Set	Kab.Barru	
							Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah SP yang mengelola BOS SD	198 SP	Kab.Barru	
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga SD	1 Jenis	Kab.Barru	
							Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa yang mengikuti UAS/UAN SD/MI	6925 Siswa	Kab.Barru	
							Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah SD yang terakreditasi	199 SP	Kab.Barru	
							Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Mata Pelajaran, Olimpiade OR dan Seni (SD), lomba uks, lomba cerdas cermat	3780 Siswa	Kab.Barru	
							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah ketersediaan Tenaga pendidik dan kependidikan	79 Orang	Kab.Barru	
							Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah PTK yang mengikuti Proses Sertifikasi	495 orang	Kab.Barru	
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Anggota Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	323 Orang	Kab.Barru	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah menengah pertama	Angka Lulusan SMP/MTs	100%	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah SMP yang terbangun	5 RK	Kab.Barru	
					Jumlah Jenis Pengelolaan Sistem Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3 Jenis	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terbangun	1 Ruang	Kab.Barru	
					Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga	100%	Pembangunan sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah	Jumlah Taman, Lapangan Upacara, Fasilitas Parkir dan pagar SMP yang terbangun-Jumlah Sarana Air Bersih/Sanitary SMP yang terbangun	3 Unit, 1 ruang	Kab.Barru	
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah RK SMP yang direhabilitasi	1 Ruang	Kab.Barru	
							Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel SMP	10 Set	Kab.Barru	
							Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SP yang mengelola BOS SMP	39 SMP	Kab.Barru	
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga SMP	1 Jenis	Kab.Barru	
							Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa yang mengikuti UAS/UAN SMP/MTs	3407 Siswa	Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi	20 SP	Kab.Barru	
							Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Mata Pelajaran, Olimpiade OR dan Seni (SMP), lomba UKS, Lomba Cerdas Cermat	3780 Siswa	Kab.Barru	
							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah ketersediaan Tenaga pendidik dan kependidikan	23 Orang	Kab.Barru	
							Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah PTK yang mengikuti Proses Sertifikasi	244 orang	Kab.Barru	
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Anggota Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	120 Orang	Kab.Barru	
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun	133,756	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah WB yang mengikuti program Keaksaraan- Jumlah Kelompok yang mengikuti program paket A/B/C - Jumlah WB Paket B/Paket C yang mengikuti pelatihan TI	100 WB, 1 LBG, 11 KLP, 100 WB, 1 JENIS	Kab.Barru	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan Disiplin dan Kapasitas SDM	32 Orang	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT	32 orang	Kab.Barru	
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan Pendukung administrasi umum	4 Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik	6 Jenis	Kab.Barru	
		Persentase aparatur yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	100%				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat kerja yang diperbaiki	342 buah	Kab.Barru	
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Tamu	342 buah	Kab.Barru	
							Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah	222 ok	Kab.Barru	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Jenis	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	25 unit	Kab.Barru	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat	6 Jenis	Kab.Barru	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telepon	3 Jenis	Kab.Barru	
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		39 unit	Kab.Barru	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	38 unit	Kab.Barru	
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan	12 unit	Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio PKM per jumlah penduduk	0,07	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	12 PKM	Pembangunan Puskesmas	Cakupan Puskesmas	8 pkm	Kab.Barru	
		Rasio Puskesmas Pembantu (pustu) persatuan Penduduk	0,19				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Pustu	3 unit	Kab.Barru	
		Cakupan ketersediaan obat yang cukup dan memenuhi syarat penyimpanan	100%				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan Perbekalan kesehatan	12 pkm	Kab.Barru	
		Cakupan ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	100%				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana distribusi, sarana pengolah data	2 jenis	Kab.Barru	
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100				Pengadaan Obat dan Vaksin	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan	140 jenis	Kab.Barru	
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	182373	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	Kab.Barru	
		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan pelayanan nifas	100%	Kab.Barru	
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100%	Kab.Barru	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan balita yang datang ke posyandu (D/S)	100%	Kab.Barru	
		Jumlah Puskesmas yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan lansia	12 PKM				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Kab.Barru	
		Persentase usia 15 thn - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia produktif	Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrining kesehatan sesuai SOP	100%	Kab.Barru	
		Persentase usia 60 thn keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	100%				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrining kesehatan pada usia 60 thn ke atas sesuai SOP	100%	Kab.Barru	
		Cakupan penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai SOP	100%	Kab.Barru	
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Cakupan Pengendalian Penyakit Menular	83,33%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan dan pengendalian Diabetes Melitus sesuai SOP	100%	Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%		Cakupan Desa/Kel UCI	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	100%	Kab.Barru		
		Cakupan Deteksi dini Penyakit akibat rokok	100%				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita penyakit TBC BTA	100%	Kab.Barru		
		Cakupan puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera sesuai standar	10 pkm				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pelayanan dan Penanganan Kelompok Resiko Tinggi (high Risk Group)	100%	Kab.Barru		
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization	55 Desa/Kel				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana	Cakupan Pelayanan Penanggulangan bencana sesuai standar	3 kej	Kab.Barru		
		Presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak sebesar	95%				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase balita dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum	100%	Kab.Barru		
		Persentase TTU, TPM dan sarana air minum yang diawasi	TTU MS 75%, TPM MS 48%, SAM diawasi 63%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Desa Melaksanakan STBM berkelanjutan,Persentase TFU, TPM dan Sarana Air Minum yang Diawasi,Cakupan desa/kel tatanan kawasan sehat yang dibina,Meningkatnya pembinaan dan pengawasan TFU dan TPM yang memenuhi syarat	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melakukan pembinaan STBM berkelanjutan, Jumlah sampel Yang diperiksa	12 PKM. 200 sampel	Kab.Barru		
		Tingkat Prevelensi Tuberkolosis (Persentase Penderita TB yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standart)	115 per 100.000 penduduk				Persentase sampel yang diperiksa	100%	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah kemitraan dengan kelompok potensial , Jumlah Pembinaan promosi kesehatan melalui media cetak dan elektronik	5 Klp,2 media	Kab.Barru
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (Persentase orang beresiko HIV AIDS yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standart)	< 0,005 persen						Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Khusus	12 pkm	Kab.Barru
		Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	12 PKM	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase puskesmas melakukan pemeriksaan dan tatalaksana pneumonia melalui program MTBS	12 pkm	Kab.Barru		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	12 pkm	Kab.Barru
		Angka Kejadian Malaria (API malaria <1 / 1000 penduduk)	<1						Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	s melakukan pembinaan kelembagaan de	12 pkm	Kab.Barru
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (SDGs)	12						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas yang mendapatkan pembiaya	12 pkm	Kab.Barru
		Cakupan Puskesmas yang mendapatkan pembiayaan BOK	100%						Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah PKM terakreditasi	5 pkm	Kab.Barru

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 Jam	100%				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan Community Based Surveillance (CBS)	55 desa/ke	Kab.Barru	
		Jumlah penemuan kasus non Polio AFP Rate 100.000 penduduk pada umur < 15 thn	≥1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan Sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	12 PKM	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Profil kesehatan, Jumlah dokumen data dasar kesehatan	Jumlah profil 13 Dok, 3 survey, monev 4 kali	Kab.Barru	
		Penanganan terhadap kejadian masalah kesehatan pada kondisi tertentu (Matra)	100%							Kab.Barru	
		Jumlah desa melaksanakan STBM berkelanjutan	55							Kab.Barru	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Rawat Jalan	2,59%	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	1 Dok	Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Jumlah dokumen data dasar sumber daya manusia kesehatan	1 Dok	Kab.Barru	
		Cakupan Rawat inap	48,5%	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diberikan rekomendasi dan mengikuti pelatihan kompetensi teknis	475 org	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan	8 orang	Kab.Barru	
4	Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan/Minuman	Jumlah fasilitas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	15 sarana	Pemberian izin apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	jumlah sarana kefarmasian dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	39 sarana farmasi, 1 optik	Pengendalian dan pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan apotek, toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat tradisional (UMOT)	Jumlah penyuluhan dan pengawasan keamanan obar dan pangan	3 PKM	Kab.Barru	
		Jumlah fasilitas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	15 sarana	pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas I tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas I tertentu perusahaan rumah tangga	jumlah toko alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu yang diberikan surat rekomendasi	3 usaha	pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas I tertentu dan PKRT kelas I tertentu perusahaan rumah tangga	Jumlah penyuluhan dan pengawasan keamanan obar dan pangan	12 PKM	Kab.Barru	
				Pemeriksaan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga	jumlah sarana Industri rumah tangga yang dilakukan pemeriksaan post market	96 sarana	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah ketersediaan alat dan bahan pemeriksaan lab sampel bahan pangan yang diduga berbahaya	5 kit	Kab.Barru	
5	Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif strata Purnama dan Strata Mandiri	22% (12 Desa) & 7% (4)	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor	Jumlah Desa siaga aktif	55 desa/ke	Peningkatan Upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah desa/kelurahan yang menganggarkan dana ADD/ADK untuk bidang kesehatan	12 pkm	Kab.Barru	
		Cakupan Posyandu Strata Purnama dan Strata Mandiri	73% (190) & 10% (25)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Posyandu	19	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah posyandu yang dibina	24 Posyandu	Kab.Barru	
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	100%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah	jumlah jenis kegiatan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM	2 jenis	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana & Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan Rumah Sakit	1 unit	Kab.Barru	
							Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat - alat Rumah Sakit	125 Jenis	Kab.Barru	
7	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah jenis pelayanan kesehatan BLUD	3 Jenis Pendapatan	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan Yang Berkualitas	3 Jenis	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pasien yang dilayani	76.215 Orang	Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga honorer yang dibayarkan, jenis ATK yang disediakan, jumlah makan minum harian pegawai	5426 eks	Kab.Barru	
		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik	2 rekeneing	Kab.Barru	
		Presentasi aparatur yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	100%				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa perbaikan peralatan kerja	2 Orang	Kab.Barru	
		Jumlah alat berat dalam kondisi baik	10 unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	7 Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kab.Barru	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan Pembayaran STNK kendaraan roda 4 dan roda 2	17 unit	Kab.Barru	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	16 unit	Kab.Barru	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja	3 Jenis	Kab.Barru	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 unit	Kab.Barru	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis sub kegiatan pendukung administrasi umum perangkat daerah	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	1 jenis	Kab.Barru	
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga	3 Jenis	Kab.Barru	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan Dinas Luar Provinsi	57 OK	Kab.Barru	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Pengadaan Alat Besar	Kendaraan Roda 2, roda 3, roda 4 dan roda 6	7 unit	Kab.Barru	
							Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan meubeler kantor	4 unit	Kab.Barru	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 unit	Kab.Barru	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta diklat formal	4 orang	Kab.Barru	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik	100%	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Kegiatan	Pembangunan Tanggul Sungai	PanjangTanggu sungai yang terbangun	1800 meter	Kab.Barru	
		Persentase Terbangunnya saluran pengendali banjir dan saluran pembuang	100%				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing	2530 meter	Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Peresentase Wilayah, Usaha, dan Kegiatan Pemanfaatan Air Tanah yang berorientasi Kepada Aspek Konservasi	100%				Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang prasarana pengaman pantai yang terbangun	3040 meter	Kab.Barru	
							Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang bantaran dan tanggul sungai yang terpelihara	150 meter	Kab.Barru	
							Peningkatan Kanal Banjir	Terbangunnya sal. Pengendali banjir dan saluran pembuang	3494 meter	Kab.Barru	
							Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Sungai yang dilakukan pengerukan dan pemeliharaan tebing	500 meter	Kab.Barru	
							Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Saluran dan Draniase yang dipelihara	195 meter	Kab.Barru	
							Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok GP3A/P3A yang dilatih dan dibina	1 Paket	Kab.Barru	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Safu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Bendung dan Panjang saluran yang terbangun	3 unit bendung + 1.030 m	Kab.Barru	
							Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan kualitasnya	2 unit bendung + 3.850 m	Kab.Barru	
							Pembangunan Bendung Irigasi	Pembangunan Bendung/Irigasi Dusun Tokkene	1 Unit	Kab.Barru	
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Bendung dan saluran irigasi yang di Rehabilitasi / Pemeliharaan	7 unit bendung + 3.400 m	Kab.Barru	
							Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang terpelihara	8 D.I	Kab.Barru	
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kondisi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	100%	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	17 Km	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Panjang Jalan yang direncanakan	17 km	Kab.Barru	
		Persentasae Jalan dan jembatan Dalam Kondisi Rusak Berat	0%				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang survey kontur jalan	17 km	Kab.Barru	
							Pembangunan Jalan	Panjang akses jalan yang terbangun	17 km	Kab.Barru	
							Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan jalan ruas kecamatan Barru	2 km	Kab.Barru	
							Pembangunan Jembatan	Jumlah akses jembatan yang terbangun	2 unit	Kab.Barru	
							Pemeliharaan Berkala Jembatan	panjang pemeliharaan jembatan	30 km	Kab.Barru	
4	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Gedung Negara yang terbangun dan terpelihara	12 Unit	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	6 unit	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan yang direncanakan, dibangun dan dilakukan ,Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan	5 unit	Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	1 Dokumen	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang ditetapkan	1 Dokumen	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penyusunan KLHS, Materi Teknis dan PERDA RDTR Kec.Barru	1 dokumen	Kab.Barru	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemanfaatan Ruang yang di koordinasikan dan di sinkronkan	7 Kecamatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	7 kecamatan	Kab.Barru	
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh sarana dan prasarana air Limbah	100%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah tangga yang memperoleh sarana dan prasarana air Limbah	255 RT	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	255 RT	Kab.Barru	
							Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana air Limbah	1 Unit	Kab.Barru	
							Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah petugas pengelola IPAL Komunal	7 orang	Kab.Barru	
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh sarana dan prasarana air minum	100%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Penyusunan Dokumen RISPAM		Kab.Barru	
							Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah tangga yang memperoleh sarana dan prasarana air minum		Kab.Barru	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	4 Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	5 Unit	Kab.Barru	
		Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	100%				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	16 Buah	Kab.Barru	
		Persentase aparatur yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	100%				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	127 Buah	Kab.Barru	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Provinsi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	324 Kali	Kab.Barru	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya ATK, Honorarium Pegawai Tidak tetap, Belanja Makanan dan Minum	30 Jenis	Kab.Barru	
							Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	4 Rek	Kab.Barru	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran jasa kebersihan kantor	24 OB	Kab.Barru	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan Pembayaran STNK kendaraan roda 4 dan roda 2	2 Unit	Kab.Barru	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan Pembayaran STNK kendaraan roda 4 dan roda 2	44 Unit	Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan peralatan kerja	6 Unit	Kab.Barru	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta diklat formal	6 Orang	Kab.Barru	
02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah bantuan perumahan layak huni	15 Unit	Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyediaan perumahan layak huni	2 Kegiatan	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana	10 unit	Kab.Barru	
03	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dipedesaan dan jumlah bantuan RTLH	100%	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipertahankan dari kekumuhan	235 Unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rehabilitasi Rumah MBR	235 Unit	Kab.Barru	
04	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah sarana infrastruktur permukiman yang terbangun	10 Jenis	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PSU	8 Kegiatan	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah Taman yang terpelihara, Jumlah Penerangan Jalan yang terpelihara, Jumlah Lampu penerangan jalan yang terpasang	4 Taman, 450 Titik, 2500 Meter	Kab.Barru	
05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	CakupanKebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi	100%	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar yang terkirim,tenaga honorer yang terbayar,alat tulis kantor,prangko, materai, dan benda pos lainnya ,Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran,Jasa Dokumentasi,Jasa Dekorasi,Cetakan Kantor,Penggunaan,Makanan Dan Minuman Harian Pegawai, Makan Minum HUT Satpol PP dan Damkar Tingkat Provinsi	650 Surat	Kab.Barru	
		Cakupan sarana dan prasaran perkantoran yang terpenuhi	100%				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telfon, air dan listrik	3 Jenis	Kab.Barru	
		Cakupan peningkatan disiplin aparatur	100%				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	6 Jenis	Kab.Barru	
		Cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur	100%				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pembersih kantor	2 Orang	Kab.Barru	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 jenis	Kab.Barru	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	2 Jenis	Kab.Barru	
							Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	5 Jenis	Kab.Barru	
							Sub-Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Perjalanan Dinas Luar Provinsi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	260 OK	Kab.Barru	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi	100%	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeleur	4 Jenis	Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	9 Jenis	Kab.Barru	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional, Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	22 Unit	Kab.Barru	
							Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan rutin /berkala Meubeler	3 Jenis	Kab.Barru	
							Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	6 Jenis	Kab.Barru	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PDH	6 Jenis	Kab.Barru	
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian kompetensi japung	12 Orang	Kab.Barru	
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	23 Orang	Kab.Barru	
02	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7 Kecamatan	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umumPencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pengamana Dan Patroli Yang Dilaksanakan dalam 3 x 24 Jam	365 Kali	Kab.Barru	
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%				Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penegakan Hukum Larangan Merokok di tempat Tempat tertentu	6 Kawasan	Kab.Barru	
		Jumlah satuan keamanan lingkungan yang terdapat di masyarakat	7 Unit				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan	280 Orang	Kab.Barru	
							Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiata Razia/Penertiban dan Pencegahan Kejahatan	30 Kali	Kab.Barru	
							Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan sarana Dan Prasarana Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah petugas jaga	100 OK	Kab.Barru	
03	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda Yang Ditegakkan	100%	Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	PersentasePenyelesaian Pelanggaran K3	100%	Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai Rokok	15 Sekolah	Kab.Barru	
							Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pengawasan Peredaran Cukai Rokok ilegal	7 Kecamatan	Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan peraturan-peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Penegakan Perda dan Penyuluhan dimasyarakat	12 Kali	Kab.Barru	
04	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran	100%	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah masyarakat yang mengikut penyuluhan dan simulasi pemadam kebakaran	100%	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah lokasi penyuluhan dan simulasi pemadam kebakaran	7 Kecamatan	Kab.Barru	
							Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah petugas damkar bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas	150 OK	Kab.Barru	
							Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	1 Unit	Kab.Barru	
							Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Jumlah aparatur damkar yang mengikuti pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	120 Orang	Kab.Barru	
							Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Jumlah naskah kerjasama dengan daerah tetangga dalam penanganan bahaya kebakaran	1 Dokumen	Kab.Barru	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi dan Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana	100%	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis sub pendukung administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Kegiatan	Sub-Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan bagi pegawai dan TRC BPBD.	36 pasang	Kab.Barru	
							Sub-Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Keikutsertaan Aparat mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	4 orang	Kab.Barru	
							Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya keikutsertaan aparat mengikuti Bimbingan Teknis.	4 orang	Kab.Barru	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis sub kegiatan pendukung administrasi umum perangkat daerah	2 Kegiatan	Sub-Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Kantor berdasarkan jenisnya.	7 unit	Kab.Barru	
							Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Provinsi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40 kali, 256 kali	Kab.Barru	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional.	2 unit	Kab.Barru	
							Sub-Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeleur Kantor.	12 unit	Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Kegiatan	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang terkirim, Jumlah peranko, materai dan benda pos lainnya, Jumlah paket/pengiriman surat, Jumlah pembayaran tenaga honorer/Relawan PB per bulan, Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor berdasarkan jenisnya, Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan berdasarkan jenisnya, Jumlah Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas, Jumlah persediaan makan dan minum berdasarkan orang dan jumlah hari.	8 jenis	Kab.Barru	
							Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis Rekening yang dibayar.	2 rekening	Kab.Barru	
							Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga penyedia jasa kebersihan kantor. (per tahun)	2 org	Kab.Barru	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	5 jenis	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan pemeliharaan dan pengurusan perizinan. (per tahun)	9 unit, 4 unit	Kab.Barru	
							Sub kegiatan Pemeliharaan mebel	Jumlah Meubeleu Kantor BPBD dalam kondisi layak.	19 buah	Kab.Barru	
							Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi layak	7 unit	Kab.Barru	
							Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang dibayarkan	2 unit	Kab.Barru	
06	Program Penanggulangan Bencana	cakupan warganegara yang memperoleh layanan penanggulangan bencana	100%	Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi bencana	7 kecamatan	Sub-Kegiatan Sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)	Jenis media informasi pelaksanaan penanganan bencana di Kabupaten Barru. Dan Jumlah Peta Kecamatan Daerah Rawan Bencana Geologi dengan melibatkan Instansi Terkait.	2 jenis, 7 kecamatan	Kab.Barru	
				Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana	7 kecamatan	Sub-Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitas Desa Tangguh Bencana	100 orang	Kab.Barru	
							Sub-Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana tingkat Desa.	40 orang	Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Alat Pelindung Diri Rescuer, Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana.	5 Jenis	Kab.Barru	
							Sub-Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten	Jumlah Peserta dari lintas sektor terkait pemulihan dampak bencana yang mengikuti BINTEK JITU-PB, Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana, Jumlah unit perbaikan sarana dan prasarana perumahan akibat bencana alam, Jumlah unit perbaikan sarana dan prasarana perumahan akibat bencana non alam, Jumlah unit perbaikan sarana dan prasarana perumahan akibat bencana sosial, Jumlah Dokumen Rencana Pemulihan Kesehatan dan Psikologis Pasca Bencana, Jumlah jiwa yang memperoleh Pemulihan Kesehatan dan Psikologis Pasca Bencana, Jumlah unit pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Fasilitas Umum.	30 orang, 1 dok RPP, 48 Unit, 30 unit, 1 dok, 50 jiwa, 10 unit, 5 unit	Kab.Barru	
				Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	jumlah lokasi yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	7 kecamatan	Sub-Kegiatan Respons Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang memadai dan dapat digunakan dalam penanganan darurat bencana.	1 UNIT CRISIS CENTER	Kab.Barru	
							Sub-Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak per-100.00 Jiwa dan Jumlah penampungan sementara disertai rambu dan Peta Jalur Evakuasi di daerah rawan bencana.	0 jiwa, 10 unit	Kab.Barru	
							Sub-Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kabupaten /Kota	Jumlah paket penyediaan Kebutuhan Dasar dan Logistik bagi korban bencana.	150 paket/kk	Kab.Barru	
				Kegiatan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Jumlah kecamatan yang dilakukan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	7 kecamatan	Sub-Kegiatan penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten	Jumlah Desa Berisiko Tinggi terhadap Bencana yang melaksanakan Pengawasan Partisipatif Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan Bidang Perumahan.	2 Desa	Kab.Barru	
							Sub-Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Kecamatan yang diadakan monitoring dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat.	1 kecamatan	Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	7 Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Jumlah masyarakat di kecamatan yang mengikuti Simulasi Pengendalian pemadam kebakaran	7 Kecamatan	Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti Simulasi Pengendalian Bahaya Kebakaran.	120 orang	Kab.Barru	
06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Jenis	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yg mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6 Orang	Kab.Barru	
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 Jenis	Kab.Barru	
		Persentase aparatur yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	100%				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	47 Unit	Kab.Barru	
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	6 Jenis	Kab.Barru	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	224 OH	Kab.Barru	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Jenis	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Peralatan gedung kantor	12 Unit	Kab.Barru	
				Penyedia Jasa Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Penyedia Jasa Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis penyediaan surat menyurat	1150	Kab.Barru	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon air dan listrik	3 Rekening	Kab.Barru	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8 Unit	Kab.Barru	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	4 Unit	Kab.Barru	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor	12 Unit	Kab.Barru	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan PSM & Karang Taruna , Orsos dan TKSJ yang memahami teknis pendampingan PMKS	100%	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jenis pengembangan Potensi	4 Jenis	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah karang taruna (KT), PSM, TKSJ, Orsos yg mendapatkan bantuan dan bimbingan melalui paket usaha ekonomi produktif	10 Orang	Kab.Barru	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase Anak dan Lansia Terlantar yang memperoleh bantuan sosial	100%	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3 Jenis	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Pendataan dan pendampingan anak dan lansia terlantar	4 KASUS	Kab.Barru	
		Presentase Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang memperoleh bantuan sosial	100%				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Lansia yang mendapatkan Bimbingan	50 Orang	Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Cakupan Eks penyandang penyakit sosial yang dibina	100%				Penyediaan Permakanaan	Jumlah Pendataan dan Pendampingan Disabilitas Terlantar	4 Kasus	Kab.Barru	
		Cakupan Eks penyandang penyakit sosial yang dibina	100%				Penyediaan Permakanaan	Jumlah Pendataan dan Pendampingan Tuna Sosial (Gelandangan, Pengemis, dan Penyakit sosial lainnya) Terlantar	4 Kasus	Kab.Barru	
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial	2 Jenis	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan Pencegahan Narkoba, HIV/AIDS	400 ORANG	Kab.Barru	
							Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Ratzia PSK di Kecamatan	3 Kali	Kab.Barru	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase masyarakat miskin yang memperoleh bantuan sosial	100%	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3 Jenis	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan beras, Jumlah Pendampingan PKH, Jumlah Tim Sistem layanan dan Rujukan Terpadu	10132 KPM/16556 KPM/103928 KK	Kab.Barru	
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (SDGs)	6332				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pelatihan pendataan dan pemutakhiran data PMKS, Jumlah PACA yang mendapatkan pelatihan keterampilan berusaha	1 Unit/55 Orang	Kab.Barru	
							Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bimbingan KUBE Keluarga Miskin	10 KLP	Kab.Barru	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan darurat pada daerah bencana	100%	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	2 Jenis	Penyediaan Makanan	Jumlah Dapur Umum yang beroperasi	1 Unit	Kab.Barru	
							Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Korban Bencana yg menerima bantuan logistik	100 KK	Kab.Barru	
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1 Jenis	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana Terlatih	10 Orang	Kab.Barru	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1 jenis	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMP yang dipelihara	7 Lokasi	Kab.Barru	
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
1	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja	100%	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	2 Jenis	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah peserta penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sosialisasi	40 Orang	Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	40 Orang	Kab.Barru	
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	% tenaga kerja yang mendapatkan sertifikasi keahlian	100%	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jenis	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja	80 orang	Kab.Barru	
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam PUG	36 PD	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Jenis	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang memiliki data terpisah	36 PD	Kab.Barru	
		Jumlah Perempuan yang telah memahami Kesetaraan Gender yang mendapatkan keterampilan	620 Org	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Jenis	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kelompok yang difasilitasi dalam Advokasi kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja	2 klp	Kab.Barru	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah Kasus KDRT	7 Kss	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Jenis	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi pencatatan dan pelaporan KDRT	2 Keg	Kab.Barru	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah P2TP2A Aktif yang dibina	1 Lbg	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Jenis	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelengkapan dan Prasarana P2TP2A mem enuhi Standar pelayanan	4 Jns	Kab.Barru	
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kab.Barru	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Anak yang terlibat dalam forum anak dan berprestasi	4 Org	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Jenis	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Kegiatan Hari Anak Nasional dan kreatifitas forum anak	6 keg	Kab.Barru	
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	Meningkatnya kapasitas sumb	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan	2 Jenis	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek	2 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan dan penyelenggaraan Administrasi Umum	4 Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Listrik/ Penerangan	3 Jenis		
		Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Terpenuhi	100%				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis		
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Provinsi/Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	90/42 Kali		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	6 Unit	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler Kantor	2 Unit		
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	2 Unit		
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	3 Unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Kantor	4 Jenis	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ATK	40 Jenis		
							Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telpon, Air dan Listrik	3 Rekening		
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pegawai Tetap	16 OK		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	4 Jenis	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	9 Unit		
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengecatan Gedung dan Pagar Kantor	11 Jenis		
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	4 Jenis		
2	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang dikelola	100%	Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	2 Jenis	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	ya Lumbung/Gudang Cadangan	1 Unit		
							Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang di Bina	7 Kelompok		
3	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Skoring Pola Pangan Harapan	92	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lain sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase stabilitas pasokan dan harga pangan	100%	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen NBM dan SKPG	6 Dokumen		
							Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal/Lomba Cipta Menu (LCM)	8 Klp		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Jumlah Kelompok yang mengikuti Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang berbasis B2SA	7 Kelompok		
							Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Harga Pangan	12 Laporan		
							Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	8 Gapoktan		
							Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelompok yang difasilitasi	7 Kelompok		
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan yang terkelola dan terjaga	8 Ton	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Daerah	8 Ton		
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase target Konsumsi pangan yang tercapai	100%	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pelatihan Keterampilan Pemanfaatan Pangan Lokal/Jumlah KWT yang Memanfaatkan Lahan Pekarangan/Pendampingan Pemanfaatan Lahan Pekarangan bagi KWT	7 Klp/7Klp/1 Klp		
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Pen Pola Konsumsi Pangan dan	13 Dokumen		
4	Penanganan Kerawanan Pangan			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan pangan yang tertangani	3 Desa	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Masyarakatnya Mendapatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan	3 Desa		
5	Pengawasan Keamanan Pangan			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan segar	7 Kecamatan	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Pangan yang Diperiksa	100 Sampel		
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
1	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan		2 Lokasi		
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Kantor	4 Jenis	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat	610 Surat	Kab.Barru	
		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7 Rekening	Kab.Barru	
		cakupan peningkatan kapasitas SDM Aparatur	100%				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas kebersihan kantor	2 Orang	Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	Kab.Barru	
				Administrasi Umum	Jumlah penyediaan dan penyelenggaraan Administrasi Umum	3 Jenis	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga	4 Jenis	Kab.Barru	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	74 Ok	Kab.Barru	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	215 Oh	Kab.Barru	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	14 Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a pemeliharaan rutin/berkala	1 Gedung	Kab.Barru	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2 Unit	Kab.Barru	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan kantor yang diperbaiki	3 Jenis	Kab.Barru	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2 Unit	Kab.Barru	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan	1 Jenis	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Kali	Kab.Barru	
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase dokumen yang dikaji	100%	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RPPLH	1 Perda	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disusun	1 Dok	Kab.Barru	
03	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Pencemaran air	100%	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	4 Jenis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan	1 Dok	Kab.Barru	
		Tingkat Pencemaran Udara	19%	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah lokasi pelaksanaan pengendalian pencemaran lahan dan/atau tanah akibat biomassa	6 lokasi	Kab.Barru	
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah objek yang dipantau kualitas limbah cair	1 Objek	Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen pengendalian dampak perubahan iklim	1 Dok	Kab.Barru	
							Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik Pencemaran status mutu air	3 titik	Kab.Barru	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah lokasi pemantauan kualitas udara	1 Lokasi	Kab.Barru	
04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,004	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	0,004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah luasan RTH yang dibuat dan ditata	0,00005	Kab.Barru	
							Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah luasan RTH yang dipelihara	0,05	Kab.Barru	
05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase B3 dan Limbah B3 yang dikendalikan	100%	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase usaha yang melakukan penyimpanan sementara LB3	100%	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	tertibnya pelaku usaha dalam pengelolaan b3 dan lb3	1 Izin	Kab.Barru	
				Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpul LB3	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	tercapainya pembinaan dan pengawasan lb3	10 Loks	Kab.Barru	
06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan LH	Persentase usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan izin Lingkungan	100%	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan izin Lingkungan		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah objek yang diawasi	6 Objek	Kab.Barru	
							Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi lingkungan	10 Rekomendasi	Kab.Barru	
07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait	Persentas Masyarakat hukum adat yang didampingi	100%	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang dibina	1 MHA	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Pendampingan pengakuan masyarakat Hukum Adat	1 KLP	Kab.Barru	
08	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan	100%	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Tercapainya indikator penilaian penghargaan kota sehat/adipura	3 Indikator	Kab.Barru	
							Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah pelaksanaan pembinaan ADIWIYATA	2 SKLH	Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lokasi pelaksanaan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	4 lokasi	Kab.Barru	
							Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah pameran yang diikuti dalam rangka penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	1 PMRN	Kab.Barru	
09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah lomba Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	2 Lomba	Kab.Barru	
10	Program penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan PPLH yang diselesaikan		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditangani	1 Kasus	Kab.Barru	
11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	0,75	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	asarana dan sarana pengelolaa	124 Unit	Kab.Barru	
							Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah MoU kerjasama pengelolaan persampahan	8 MoU	Kab.Barru	
							Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen pengelolaan persampahan	1 Dok	Kab.Barru	
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta yang diawasi dan dibina		Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah dok monitoring dan evaluasi dan rencana tindak lanjut program penataan lingkungan hidup	1 Dok	Kab.Barru	
							Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	jumlah dok monitoring dan evaluasi dan rencana tindak lanjut program penataan lingkungan hidup	1 Dok	Kab.Barru	
							Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	jumlah Dokumen monitoring program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Dok	Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	jumlah Dokumen monitoring program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 Dok	Kab.Barru	
							Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	jumlah dok monitoring dan evaluasi dan rencana tindak lanjut program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1 Dok	Kab.Barru	
							Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen SLHD yang disusun	1 Dok	Kab.Barru	
12	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Pengelolaan Persampahan			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota			29 unit, 190 Org	
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA/Kabupaten Kota			29 Unit	
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Jenis	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur/PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	2 Orang	Kab.Barru	
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan/diikuti	2 Orang	Kab.Barru	
		cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur	100%				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah aparatur yang mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan	2 Orang	Kab.Barru	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 Jenis	Kab.Barru	
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga	11 Jenis	Kab.Barru	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Keluar dan Kedalam Daerah	41 Orang/Kali	Kab.Barru	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	Kab.Barru	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	7 Unit	Kab.Barru	
							Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeleur	4 Unit	Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Jenis	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang terkirim	2 Jenis	Kab.Barru	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara	21 Unit	Kab.Barru	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	24 Unit	Kab.Barru	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah penduduk yang dilayani administrasi kependudukan (KTP KK)	7744	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Jenis	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan KTP, SKPWNI, KK	17602 Orang	Kab.Barru	
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah Penduduk yang dilayani Pencatatan Sipil	3 Laporan	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Jenis	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Kematian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan	9307 Orang	Kab.Barru	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Laporan pengembangan data base kependudukan	3 Laporan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Jenis	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi kebijakan kependudukan	7 Kecamatan	Kab.Barru	
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Sistem Administrasi Kependudukan Yang dijabarkan	1 Sistem	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Penyusunan Profil Kependudukan	1 Jenis	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan lainnya	Jumlah Buku Profil yang diterbitkan	1 Buku	Kab.Barru	
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Jenis	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		3 org	Kab.Barru	
		Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		10 buah	Kab.Barru	
		Cakupan kebutuhan kompetensi Spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumber daya aparaturnya	100%				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12 buah	Kab.Barru	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Jenis	Kab.Barru	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		1 jenis	Kab.Barru	
							Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		5 Jenis	Kab.Barru	
							Pengadaan Mebeleur		3 Jenis	Kab.Barru	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		17 Jenis	Kab.Barru	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3 Jenis	Kab.Barru	
							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		2 org	Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		6 unit	Kab.Barru	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3 unit	Kab.Barru	
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		1 jenis	Kab.Barru	
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase seluruh desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan administrasi desa	100%	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Fasilitasi Kerja sama antar Desa	1 Jenis	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa		40 Desa	Kab.Barru	
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase seluruh desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan administrasi desa	100%	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10 Jenis	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		40 Desa	Kab.Barru	
		cakupan desa yang meningkat dalam pengelolaan pemerintahan desa	100%				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		40 Desa	Kab.Barru	
		Jumlah desa yang memiliki Dokumen Perencanaan Tahunan sesuai standar	40 Desa				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa		40 Desa	Kab.Barru	
		cakupan desa/ kel yang mendapatkan pembinaan kelembagaan ekonomi	100%				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa		40 Desa	Kab.Barru	
							Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		40 Desa	Kab.Barru	
							Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		40 Desa	Kab.Barru	
							Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		40 Desa	Kab.Barru	
							Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		40 Desa	Kab.Barru	
							Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		40 Desa	Kab.Barru	
							Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		12 Pasar Desa	Kab.Barru	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	100%	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Jenis	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Kab.Barru	
		Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	100%				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		cakupan desa/ kel yang mendapatkan pembinaan kelembagaan ekonomi	100%				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			Kab.Barru	
		cakupan desa yang menerapkan TTG	100%				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Kab.Barru	
							Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Kab.Barru	
							Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Kab.Barru	
14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA											
1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah PUS yang terdaftar menjadi Peserta KB Aktif	3000 Org	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Jenis	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang		2 Kjp	Kab.Barru	
		Jumlah PIK KR yang terbentuk	5 Klp				Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)		100 Org	Kab.Barru	
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1 Jenis	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			Kab.Barru	
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	1 Jenis	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			Kab.Barru	
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Jenis	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		200 orang	Kab.Barru	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah BKB.BKR.BKL dan UPPKS yang dibina	810 Klp	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Jenis	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		7 Kec	Kab.Barru	
15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya		107 orang	Kab.Barru	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		3780	Kab.Barru	
		cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		3 Orang	Kab.Barru	
		Tingkat pencapaian disiplin aparatur		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5 jenis	Kab.Barru	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30 Orang	Kab.Barru	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		10 unit	Kab.Barru	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10 unit	Kab.Barru	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab.Barru	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		500 Surat	Kab.Barru	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		10 Rekening	Kab.Barru	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		17 Kendaraan	Kab.Barru	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20 unit	Kab.Barru	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah rambu jalan	193 unit	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Rambu 137 unit, marka 7150 meter, pagar pengaman 145 meter	Kab.Barru	
		jumlah marka jalan	26 km				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		5676 meter	Kab.Barru	
		Pagar Jalan	1 km	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C			Kab.Barru	
		Persentase kegiatan operasional pengelolaan pelabuhan penyeberangan dan Terminal					Pembangunan Gedung Terminal		1 Paket	Kab.Barru	
		Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang dipelihara dan direhabilitasi					Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		2 paket	Kab.Barru	
		Persentase penghargaan yang diperoleh di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		9 unit	Kab.Barru	
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Kab.Barru	

